

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 – 2024 PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto 77
Telp. (0323) 321500 – 323003
SAMPANG 69213

Email : disdiksampang@yahoo.co.id
Telpon/Fax : 0323-321500

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 Perubahan dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah menyiapkan dokumen ini.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2019 Perubahan disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang akan dicapai dalam periode 2019 – 2024. Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Sampang terpilih, dengan fokus pada **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.**

Kami jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat Ridho Allah SWT. Amin.

Sampang,

2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan	1-6
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra.....	1-7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	2-1
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	2-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	2-32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah Terpilih ...	3-10
3.3. Telaahan Renstra K/L & Renstra PD Propinsi	3-12
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	3-14
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	3-14
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	4-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	5-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	5-1
6.1 Program dan Kegiatan	6-1
6.2. Indikator Kinerja	6-29
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN	7-1
BAB VIII : P E N U T U P	8-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD mencakup: tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra; program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Dasar dalam penyusunan Renstra PD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra PD mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OPD diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah pada instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan hasil perubahan mencakup :

- 1. Penyesuaian terhadap tugas dan fungsi;**
- 2. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran;**
- 3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;**
- 4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.**

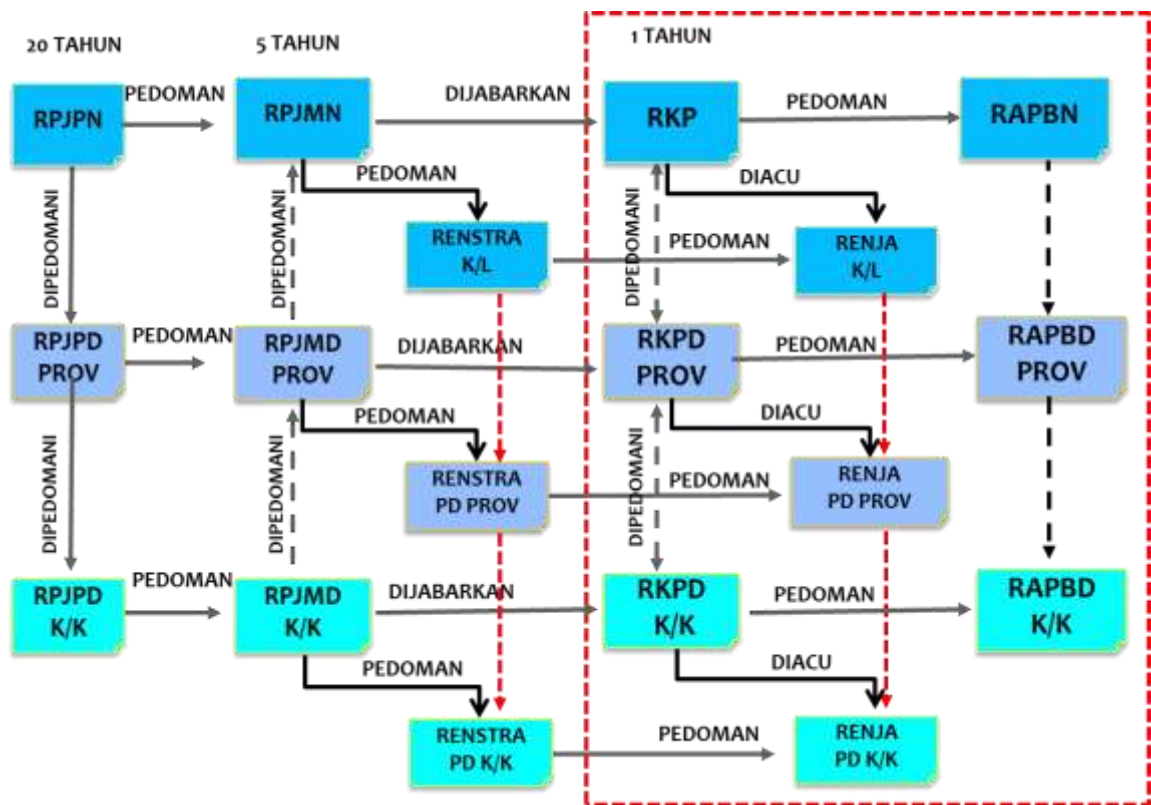
Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra yang disusun ini berdasarkan pada data dan mengupayakan pelibatan stakeholders yang lebih luas sehingga akan memberikan dukungan pada tahap pelaksanaan perencanaan

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019 - 2024 Perubahan disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun landasan hukum adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas Pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Perubahan adalah memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan.
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA dan RAPBD).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Sampang. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024 Perubahan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

- 5.1 Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja
- 5.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berlaku mulai Januari 2022. Agar organisasi lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas tersebut mempunyai lima fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

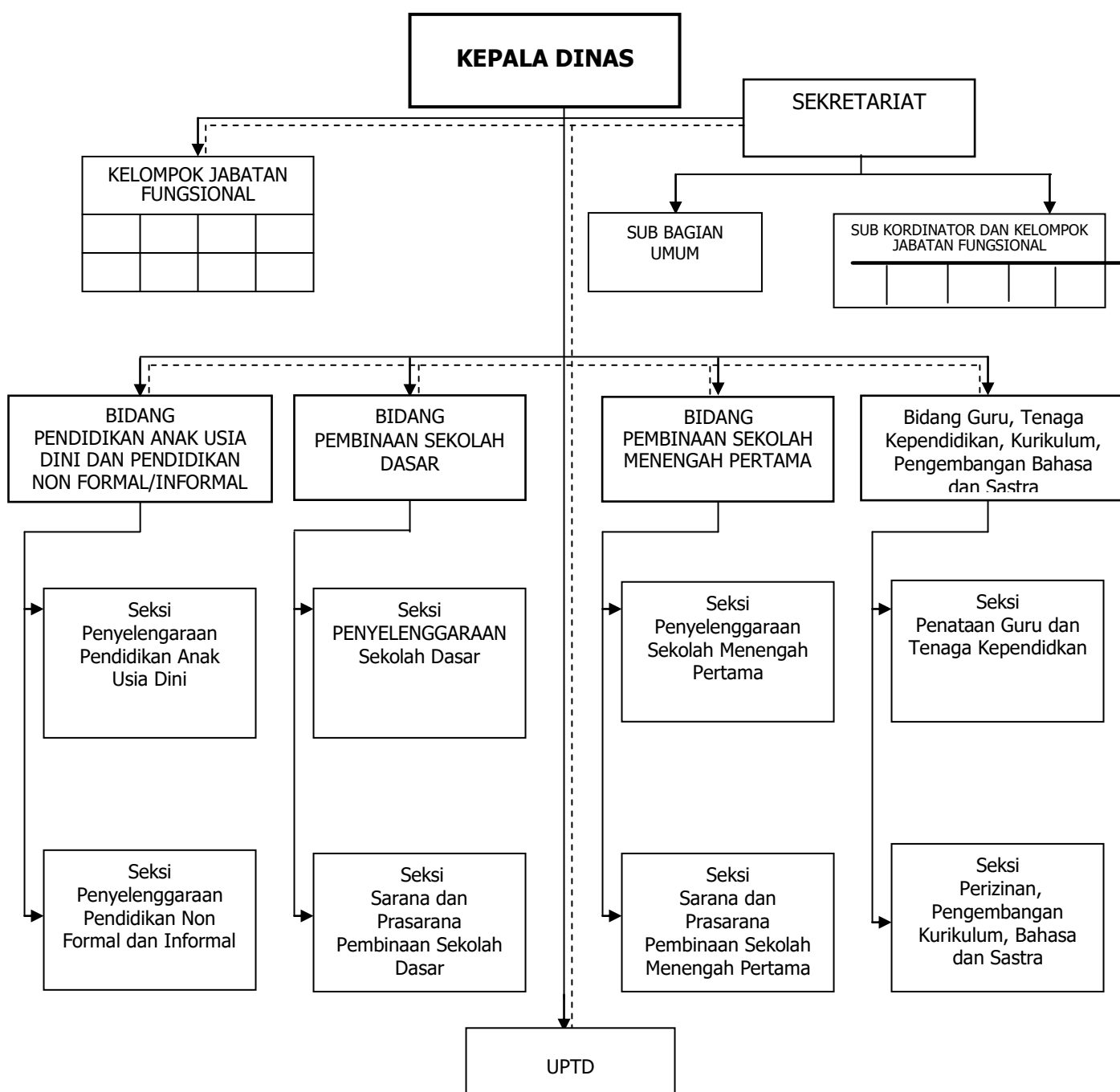
✚ Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi:
 1. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahi:
 1. Seksi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Perizinan. Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- g. UPT Dinas dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- ✚ Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- ✚ Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- ✚ Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- ✚ Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Sampang



1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protocol. Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat, pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- j. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- k. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan;

- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretaris membawahi:

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.

Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan inklusi;
- b. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan inklusi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal;

- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan Inklusi;
- e. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kelender pendidikan dan jam mengajar efektif serta penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan Inklusi;
- f. penyiapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- g. pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- h. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan inklusi;
- j. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- k. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal, serta distribusi pengadaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal;
- l. melaksanakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal;
- m. melaksanakan pengembangan karir meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun Pendidik;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal serta pendidikan inklusi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi:

- A. **Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**, mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kalender pendidikan dan jam mengajar efektif, bahan ajar serta penilaian hasil belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. mempersiapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. memfasilitasi akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga/multimedia pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. melaksanakan pengembangan karir meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun Pendidik;
 - j. melaksanakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal.
- a. **Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal**, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan kegiatan dan anggaran Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kalender dan jam mengajar efektif, bahan ajar, penilaian hasil belajar Pendidikan Nonformal dan Informal;

- c. memfasilitasi akreditasi Pendidikan Nonformal dan Informal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan mutu lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
- e. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
- f. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Nonformal dan Informal;
- g. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga/multimedia pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- h. melaksanakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- i. melaksanakan pengembangan karir meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Bidang tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- c. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian, kalender pendidikan dan jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan Inklusi;
- d. mempersiapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- e. pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;

- f. pemfasilitasian akreditasi pendidikan Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
- g. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;
- h. pemfasilitasian pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar;
- i. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Sekolah Dasar, serta distribusi pengadaan sarana;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
- k. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- l. melaksanakan pengembangan karir meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun Pendidik; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:

- A. Seksi Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan kegiatan dan anggaran Seksi Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kalender dan jam mengajar efektif, bahan ajar serta penilaian hasil belajar Sekolah Dasar;
 - c. menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar;
 - d. mengembangkan manajemen peningkatan mutu lembaga Sekolah Dasar;
 - e. memfasilitasi akreditasi Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah Dasar;
 - f. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Sekolah Dasar;
 - g. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar;
 - h. melaksanakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

- i. menyiapkan bahan pengembangan karier meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti bagi guru dan tenaga pendidikan Sekolah Dasar;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

B. **Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar**, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Sekolah Dasar;
- b. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Sekolah Dasar;
- c. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga/multimedia pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Sekolah Dasar;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Sekolah Dasar; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

4. **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
- c. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kalender pendidikan dan jam mengajar efektif serta penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan Inklusi;
- d. menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;

- e. pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- f. pemfasilitasian akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
- g. pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pemfasilitasian pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Sekolah Menengah Pertama, serta distribusi pengadaan sarana;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan pendidikan tinggi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi:

- A. **Seksi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama** mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan kegiatan dan anggaran Seksi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kalender dan jam mengajar efektif, bahan ajar dan penilaian hasil belajar Sekolah Menengah Pertama;
 - c. menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. memfasilitasi akreditasi Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama;
 - e. melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan mutu lembaga Sekolah Menengah Pertama;
 - f. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan kepada lembaga Sekolah Menengah Pertama;

- g. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. menyiapkan bahan pengembangan karier meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti bagi guru dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- k. melaksanakan fasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan perguruan tinggi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

B. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. mengadakan perencanaan pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. merencanakan, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan alat peraga pembelajaran serta buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. merencanakan dan memberi bantuan peralatan Teknologi Informasi untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra

Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal;

- c. pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengusulan mutasi dan promosi guru dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan program guru penggerak;
- f. penerbitan rekomendasi izin Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang dilaksanakan di kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahi:

- A. **Seksi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan**, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. melaksanakan pendistribusian Insentif Guru Tidak Tetap (GTT);
 - c. melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. mengusulkan mutasi dan promosi guru dan tenaga kependidikan;
 - e. melaksanakan program guru penggerak; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
- B. **Seksi Perizinan, Pengembangan Bahasa dan Sastra** mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penilaian kelayakan usul dan memberikan rekomendasi perizinan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan kurikulum, kompetensi dasar, silabus dan kompetensi lulusan muatan lokal;
 - d. melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal dan buku cerita rakyat daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan kamus bahasa daerah, publikasi bahasa dan sastra daerah;
 - f. melaksanakan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, Pengembangan Bahasa dan Sastra.

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2022 sebanyak 68 orang PNS dengan rincian:

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	24	3	27
2	GOLONGAN III	20	13	33
3	GOLONGAN II	7	1	8
	JUMLAH	51	17	68

Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan, terdiri dari:

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Ijazah S-3	2	-	2
2	Ijazah S-2	27	4	31
3	Ijazah S-1	9	11	20
4	Ijazah D-3	2	1	3
5	Ijazah SMA	11	1	12
	JUMLAH	51	17	68

Total asset yang dimiliki Dinas Pendidikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 325.634.358.610,09 dengan rincian pertahun sebagai berikut:

1. Tahun 2016 sebesar Rp. 37.082.792.528,00
2. Tahun 2017 sebesar Rp. 59.407.616.776,39
3. Tahun 2018 sebesar Rp. 42.443.656.020,00,
4. Tahun 2019 sebesar Rp. 94.513.562.768,03
5. Tahun 2020 sebesar Rp. 49.918.707.319,67
6. Tahun 2021 sebesar Rp. 42.268.023.198,00

Selain sumber daya yang disebutkan diatas, sumber daya yang dimiliki di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan Penduduk Usia 4-6 Tahun dan Perkembangan Pendidikan Anak Usia

Sebagaimana disajikan pada Tabel 7, selama dua tahun terakhir jumlah peserta didik PAUD Formal dan Non Formal terus meningkat, dari sebanyak 22.602 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 31.117 orang pada tahun 2021. Peningkatan jumlah peserta didik tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah lembaga, ruang kelas dan guru TK serta peningkatan APK-nya.

Tabel 2.2
Perkembangan Penduduk, Siswa, Sekolah, Ruang Kelas,
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2017 s.d. 2021

No.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	KET
1	Jumlah Penduduk 4-6	35.193	35.397	38.369	41.867	53.029	
2	Jumlah Lembaga	714	853	870	746	822	
	TK	275	296	307	290	338	
	KB	330	409	419	343	365	
	TPA	1	2	1	1	1	
	SPS	108	146	143	112	118	
3	Jumlah Siswa	22.602	23.730	25.384	28.610	31.117	
	TK	11.313	11.683	11.820	12.007	11.839	
	KB	8.134	9.120	9.920	12.314	14.437	
	TPA	17	17	22	24	26	
	SPS	3.138	2.910	3.622	4.265	4.815	
4	Rombel	1.640	1.462	1.642	1.640	1.640	
5	APK PAUD	83	85,44	87,76	88,11	74,29	

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2017 s/d 2021

Namun, sebaliknya, jumlah penduduk usia PAUD atau penduduk usia 4 sd 6 tahun di Kabupaten Sampang meningkatnya relatif rendah dengan jumlah sebanyak 35.193

orang pada tahun 2017 menjadi 53.029 orang pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada jumlah siswa, guru, lembaga dan Rombel kecendrungan naik.

b. Perkembangan Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Perkembangan SD/MI

Berbeda dengan jenjang TK serta SLB, pada jenjang pendidikan SD/MI, peningkatan jumlah siswa dan peningkatan APM dan APK SD/MI pada kurun waktu tahun 2016 sd tahun 2021 terjadi fluktuasi, juga disertai dengan penurunan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebagaimana data pada Tabel 8.

Tabel 2.3
Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas
Dan Angka Partisipasi Kasar SD dan MI Tahun 2016 s.d. 2021

No.	Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia 7-12 tahun	Orang	105.481	108.727	112.924	110.632	110.576	99.776
2	Sekolah	Lemb	1.095	1.099	1.095	1.093	1.087	1074
	a. SD	Lemb	618	621	616	622	617	605
	b. MI	Lemb	477	478	479	469	468	469
3	Siswa	Orang	120.437	119.212	120.889	113.447	111.711	
	a. SD	Orang	76.085	74.361	73.133	71.251	69.877	69.738
	b. MI	Orang	44.352	44.851	47.756	42.196	41.834	41.179
4	Guru	Orang	7.352	8.433	9.304	9.354	9.574	9.004
	a. SD	Orang	5.849	5.159	5.087	5.068	5.094	5.410
	b. MI	Orang	1.503	3.274	4.217	4.286	4.480	3.594
5	Ruang Kelas	R.Kelas	5.433	5.754	8.441	6.492	6.722	6.445
	a. SD	R.Kelas	3.660	3.671	3.831	3.629	3.854	3.631
	b. MI	R.Kelas	1.773	2.083	4.610	2865	2.868	2.814
6	APK SD/MI	%	115,39	112,11	109,32	105,08	103,78	113,80
7	APM SD/MI	%	98,65	97,31	97,40	96,69	94,41	103,56

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2016 s/d 2021

Namun demikian, meskipun jumlah penduduk usia, jumlah siswa serta APM dan APK meningkat, tetapi jumlah lembaga dan jumlah ruang kelas justru menurun, sedangkan jumlah gurunya meningkat. Penurunan jumlah lembaga dan ruang kelas tersebut terutama terjadi karena dilaksanakannya program regrouping SD.

Jika dibandingkan kondisi SD dengan MI, tidak terdapat perbedaan yang menyolok yaitu jumlah siswa SD dibanding MI berkisar hampir 1 berbanding satu, sedangkan jumlah guru berkisar 1 berbanding 1, perbandingan jumlah lembaga berkisar 1 berbanding 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 1 berbanding 1.

c. Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Perkembangan SMP/MTs

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana disajikan pada Tabel 9, selama kurun waktu tahun 2016 s.d 2021 terdapat keadaan yang berfluktuasi, jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2016 s/d 2021 naik, demikian juga dengan jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun. Sedangkan jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya maupun jumlah lulusannya selalu naik pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 juga naik. Keadaan yang berfluktuasi tersebut tidak terjadi pada prosentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK.

Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar aspek, tetapi ternyata baik APK maupun APM-nya konstan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, yang berarti bahwa penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru dan jumlah ruang kelasnya.

Jumlah lembaga SMP/MTs secara keseluruhan mengalami kenaikan mulai tahun 2016 s.d. tahun 2021. Keadaan tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah siswanya juga mengalami kenaikan yang signifikan, karena jumlah siswa SMP/MTs. Naik pada tahun 2016 sebanyak 51.354 berfluktuatif dan turun sedikit menjadi 48.641 pada tahun 2021.

Tabel 2.4
Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun , Siswa, Guru, Sekolah,
Ruang Kelas dan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2013-2018

No	Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia 13-15 Th	Orang	105.481	54.375	55.175	51.816	51.511	46.518
2	Sekolah	Lemb.	473	486	481	505	505	506
	a. SMP	Lemb.	255	261	255	279	283	283
	b. MTs	Lemb.	218	225	226	226	222	223
3	Siswa	Orang	51.354	52.591	53.913	50.648	48.830	48.641
	a. SMP	Orang	31.176	31.432	30.995	31.338	30.026	29.201

No	Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	b. MTs	Orang	20.178	21.159	22.918	19.310	18.804	19.440
4	Guru	Orang	5.136	4.479	4.360	4.457	4.579	5.521
	a. SMP	Orang	2.360	2.118	2.055	2.175	2.272	3.377
	b. MTs	Orang	2.776	2.361	2.305	2.282	2.307	2.144
5	Ruang Kelas	Kelas	2.194	1.723	1.969	1.913	1.859	2.048
	a. SMP	Kelas	1.264	1.128	1.142	1.086	1.139	1.339
	b. MTs	Kelas	930	595	827	827	720	709
6	APK SMP/MTs	%	103,81	102,18	102,11	102,22	100,31	106,56
7	APM SMP/MTs	%	73,62	73,86	74,76	83,55	81,76	86,06

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2016 s/d 2021

d. Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Perkembangan SMA/MA/SMK

Pada kurun waktu tahun 2016 s.d 2021, perkembangan penduduk usia 16-18 tahun tidak jauh berbeda dengan perkembangan penduduk usia 7-12 tahun, juga dengan perkembangan penduduk usia 13-15 tahun. Penduduk usia 16-18 tahun 2016 s/d 2021, cenderung stabil.

Sedangkan jumlah siswa SMA dan SMK usia 16-18 tahun maupun jumlah siswa keseluruhan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, sedangkan jumlah siswa MA juga mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai tahun 2018, demikian juga jumlah guru MA dan lembaga MA setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah guru pada lembaga SMK mengalami naik dan turun.

Peningkatan yang konstan juga terjadi pada APK dan APM secara keseluruhan, Apabila dirinci berdasarkan jenis sekolah, APK masing-masing lembaga mengalami peningkatan.

Tabel 2.5
Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun , Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas, dan Angka Partisipasi Kasar SMA, SMK, dan MA Tahun 2016-2021

No.	Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia 16-18	Orang	52.992	56.728	58.670	52.982	52.785	19.312

No.	Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tahun							
2	Sekolah	Lembaga	233	238	235	254	262	270
	a. SMA	Lembaga	76	79	76	80	82	81
	b. SMK	Lembaga	73	73	73	81	82	83
	c. MA	Lembaga	84	86	86	93	98	106
3	Siswa	Orang	32.179	30.339	34.413	33.243	33.512	38.291
	a. SMA	Orang	11.434	11.292	11.895	11.923	11.972	15.039
	b. SMK	Orang	9.011	9.355	9.840	10.098	10.098	10.824
	c. MA	Orang	11.734	9.692	12.678	11.222	11.442	12.428
4	Guru	Orang	5.239	2.496	2.743	2.505	2.528	2.516
	a. SMA	Orang	1.543	783	760	827	827	830
	b. SMK	Orang	1.292	645	647	700	700	699
	c. MA	Orang	2.404	1.068	1.336	978	1.001	987
5	Ruang Kelas	R.Kelas	1.247	1.308	1.147	1.158	1.175	1.234
	a. SMA	R.Kelas	422	451	348	352	352	469
	b. SMK	R.Kelas	357	389	331	338	338	449
	c. MA	R.Kelas	468	468	468	468	485	318
6	APK SM	%	63,51	57,57	63,09	67,72	68,18	211,93
7	APM SMA	%	44,48	43,85	45,90	56,68	60,34	154,55

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2016 s/d 2021

e. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal / Informal

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program pendidikan luar sekolah meliputi : (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD; (3) Paket B setara SMP; (4) Paket C setara SMA; (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keluarga.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional adalah untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Tabel 14 Menunjukkan banyaknya penduduk buta huruf kelompok usia 15 tahun ke atas dan jenis kelamin. Dilihat dari prosentase penduduk buta huruf maka Angka Buta Huruf sebesar 7.57 % sedangkan Angka Melek Huruf sebesar 92,43 %.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Buta Huruf Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Sampang Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JML PDD USIA 15 TH KEATAS YANG DAPAT BACA TULIS	JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS	ANGKA MELEK HURUF	JML PDD U15 THN KEATAS YG BUTA HURUF	ANGKA BUTA HURUF
1	KEC. SRESEH	26.967	36.490	73,90	9.523	26,10
2	KEC. TORJUN	21.901	21.906	99,98	5	0,02
3	KEC. SAMPANG	32.495	33.185	97,92	690	2,08
4	KEC. CAMPLONG	45.075	45.746	98,53	671	1,47
5	KEC. OMBEN	12.351	14.432	85,58	2.081	14,42
6	KEC. KEDUNDUNG	56.190	59.616	94,25	3.426	5,75
7	KEC. JRENGIK	48.278	51.888	93,04	3.610	6,96
8	KEC. TAMBELANGAN	79.103	80.798	97,90	1.695	2,10
9	KEC. BANYUATES	46.002	46.041	99,91	39	0,09
10	KEC. ROBATAL	13.737	19.986	68,73	6.249	31,27
11	KEC. KETAPANG	56.160	60.566	92,72	4.406	7,28
12	KEC. SOKOBANAH	44.255	54.029	81,91	9.774	18,09
13	KEC. KARANGPENANG	21.694	25.249	85,92	3.555	14,08
14	KEC. PANGARENGAN	63.190	63.943	98,82	753	1,18
JUMLAH		567.398	613.878	92,43	46.480	7,57

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2012/2013

Program Paket A setara SD dan Paket B setara SMP adalah untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD dan SMP untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini, namun datanya sudah dibahas diatas bersama PAUD Formal

Satuan pendidikan dalam pendidikan luar sekolah adalah Kelompok Belajar (Kejar). Peserta didik pada jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar, sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Kejar Paket A (untuk buta aksara Latin dan Angka Arab, buta Bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar), Kejar Paket A setara SD (untuk putus sekolah SD), dan Kejar Paket B setara SMP (untuk putus sekolah SMP), sedangkan untuk jenis pendidikan kejuruannya, oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk Kejar Usaha (KBU) yang terdiri berbagai rumpun ketrampilan.

Satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat /swasta adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Lembaga Kursus, Dalam pada itu, khusus bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun *Balita) diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan satuan-satuan pendidikan sekolah maupun luar sekolah serta program lintas sektoral yang relevan. Termasuk didalamnya pendidikan berkelanjutan ini adalah pendidikan bagi masyarakat yang tidak/belum memiliki keterampilan dan tidak/belum bekerja serta tidak mampu karena faktor ekonomi, agar dapat berkompetisi di dunia kerja maupun berusaha membuka lapangan kerja.

Pada Tabel 16 tampak bahwa jumlah warga belajar Paket C lebih banyak dibanding dari Paket B dan A, yaitu 3.169 orang berbanding 2.727 dan 2.507 orang. Ini berarti masyarakat yang putus sekolah tingkat SMA, lebih banyak dari yang putus sekolah tingkat SD dan SMP, akan tetapi jumlah kelompok belajar antara Paket A, Paket B dan Paket C sebanyak 32 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Tabel 8
Jumlah Warga Belajar, Kelompok Belajar, dan Tutor Tahun 2018-2021

No.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	KET
1	Lembaga PKBM	32	34	31	32	
2	Jumlah WB	6.413	7.757	7.577	8.402	
	Paket A	1.602	2.804	2.754	2.507	
	Paket B	2.257	2.317	2.106	2.727	
	Paket C	2.553	2.636	2.717	3.169	
3	Tutor	162	390	756	761	

Sumber Data : Profil Pendidikan tahun 2018 - 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Renstra		
Uraian	Indikator Kinerja	
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	APK PAUD
	2	Angka Melek Huruf
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	7	Rata-rata Nilai USBN
	8	Rata-rata Nilai UN

Sedangkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selama periode Renstra sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan																						
1	APK PAUD		101		87,5	90,58	93,67	95,9	98,1	101	87,76	88,11	74,29	95,9	98,1	101	100,30	97,27	79,31	100	100	100	
2	Angka Melek Huruf		95,5		93	93,5	94	94,5	95	95,5	92,75	92,75	92,75	94,5	95	95,5	99,73	99,36	98,67	100	100	100	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		100		97,9	98,3	98,7	99,1	99,6	100	96,65	94,41	103,56	99,1	99,6	100	98,72	96,04	104,92	100	100	100	
4	Angka putus sekolah (APS) SD/MI		0,08		0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,12	0,23	0,25	0,1	0,09	0,08	108,33	52,17	44,00	100	100	100	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		80,5		75,76	76,78	77,74	78,65	79,55	80,5	83,55	81,76	86,06	78,65	79,55	80,5	110,28	106,48	110,70	100	100	100	
6	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs		0,2		0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,02	0,57	0,74	0,22	0,21	0,2	1250	42,11	31,08	100	100	100	
7	Rata-rata Niali USBN		75		65,15	68,45	71,25	73,75	74,15	75	71,33	75,51	77,34	73,75	74,15	75	109,49	110,31	108,55	100	100	100	
8	Rata-rata Nilai UN		46,72		41,7	42,68	43,72	44,68	45,7	46,72	46,54	78,56	73,89	44,68	45,7	46,72	111,61	184,07	169,01	100	100	100	
	SPM DIKDAS																						
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar *)	100			99,70	98,30	100	100	100	100	104	96,79	105,67	100	100	100	104,31	98,46	105,67	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan *)	100			10,34	10,08	100	100	100	100	10	10,08	23,57	100	100	100	96,71	100	23,57	100	100	100	
3	Jumlah SD/MI yang semua rombongan	100			87,76	90,58	100	100	100	100	88	88,11	72,67	100	100	100	100,27	97,27	72,67	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	
	belajarnya tidak melebihi 32 orang																						

Sasaran " *Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan*" ada 8 indikator dengan capaian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 capaian APK PAUD sebesar 74,29%, berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 93,67%. Hal ini diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan anaknya pada sekolah TK dan PAUD Sejenis (PAUDNI). Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan layanan, daya tampung lembaga PAUD, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Angka Melek Huruf pada Tahun 2021 capaian sebesar 92,74% berada dibawah target sebesar 94%. Karena kegiatan keaksaraan fungsional kurang maksimal.
3. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2021 sebesar 103,56%, berada diatas target yang ditetapkan sebesar 98,70%. Adapun upaya yang dilakukan seperti: (1) sosialisasi kepada masyarakat terutama pada orang tua yang mempunyai putra diusia sekolah, (2) banyaknya dana bantuan yang diberikan kepada siswa, (3) terpenuhinya sarana dan prasarana yang semakin memadai, mulai dari pemeliharaan, rehab sampai dengan pembangunan ruang kelas dan pembangunan gedung sekolah.
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2021 mencapai 0,25%, berada dibawah target sebesar 0,11%. tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,11 %. Ini disebabkan adanya siswa bekerja membantu orang tua, Pandemi Covid-19 yang masih melanda, dan masalah sosial dan budaya lainnya.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sejumlah 40.035 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun sebanyak 46.518 orang. Dengan demikian capaian APM SMP/MTs/Paket B sebesar 86,06 % sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 77,74%..
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, diperoleh dari Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebanyak 361 dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 sebanyak 49.571 siswa. angka putus sekolah pada tahun 2021

sebesar 0,74% tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,23%, hal ini disebabkan pernikahan dini, bekerja membantu orang tua, Pandemi Covid-19, dan masalah sosial dan budaya lainnya.

7. Realisasi Rata-rata Nilai USBN pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,34 dari target 71,25, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 108,55%. Tahun 2021 tidak ada USBN dikarenakan adanya regulasi baru, nilai tersebut merupakan nilai ujian sekolah.
8. Rata-rata Nilai UN pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan sebesar 73,89 dari target 43,72, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 169,01 %. Tahun 2021 ini tidak ada UN disebabkan adanya regulasi baru sehingga nilai tersebut diperoleh dari hasil Ujian Sekolah

Capaian SPM Dikdas selama 3 tahun cenderung makin baik dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Terdapat beberapa indikator telah terpenuhi sampai dengan 100 persen, namun sebagian besar indikator memerlukan upaya efektif untuk meningkatkannya karena masih jauh dari yang ditargetkan. Berikut uraian singkat hasil capaiannya:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan target 100% tercapai 105,67 % pada tahun 2021 sudah cukup baik.
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan pada tahun 2021 dengan target 100% tercapai sebesar 23,57% jauh dibawah target diperlukan berbagai upaya untuk mencapai target.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD capaian pada tahun 2021 sebesar 72,67% masih dibawah target sebesar 100%. Hal ini diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan anaknya pada sekolah TK dan PAUD Sejenis (PAUDNI). Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan layanan, daya tampung lembaga PAUD, sarana dan prasarana yang memadai

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dapat di lihat pada tabel di bawah ini (Tabel 2.3.2)

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang 2019 – 2024

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUH AN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI DAN TUNJANGAN)	415.172.531.534,00	417.391.496.293,53					388.206.111.434,00	367.805.572.392,00					0,94	0,88					0,01	-
1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	415.172.531.534,00	417.391.496.293,53					388.206.111.434,00	367.805.572.392,00					0,94	0,88					0,01	-
B.	BELANJA LANGSUNG	150.136.662.237,36	138.710.004.541,28					135.966.769.627,50	131.428.382.658,77					0,91	0,95					-	0,08
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	2.477.339.000	2.398.995.280					2.203.559.239	1.988.353.115					0,89	0,83					-	0,10
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.677.380.000	2.037.188.755					1.472.800.189	1.733.206.377					0,88	0,85					-	0,18
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	542.874.000	217.958.525					503.482.050	194.850.350					0,93	0,89					-	0,61
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	257.085.000	143.848.000					227.277.000	60.296.388					0,88	0,42					-	0,73
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.125.396.000	453.453.000					1.029.658.070	433.708.928					0,91	0,96					-	0,58
4	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	500.000.000	178.603.000					482.324.975	169.389.000											-	-
5	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	154.000.000	121.800.000					100.577.220	114.787.782					0,65	0,94					-	0,14
6	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.396.000	153.050.000					446.755.875	149.532.146					0,95	0,98					-	0,67
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.150.000	-					-	-					0,00						-	-
7	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	40.150.000						-	-											-	-
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	215.661.250	339.364.700					173.286.145	246.183.257					0,80	0,73					-	0,42
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	122.240.000	78.857.500					101.954.680	66.773.258					0,83	0,85					-	0,35
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	30.071.250	27.352.500					29.284.445	26.780.225					0,97	0,98					-	0,09
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	63.350.000	233.154.700					42.047.020	152.629.774					0,66	0,65					-	2,63
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	10.422.368.000	9.092.931.631					10.164.674.675	8.088.570.557					0,98	0,89					-	0,20
11	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;	296.181.000	245.455.175					230.143.625	192.997.731					0,78	0,79					-	0,16
12	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini	143.124.500	143.601.010					119.139.450	88.078.796					0,83	0,61					-	0,26
13	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	6.674.482.500	248.407.152					6.617.120.000	218.794.730					0,99	0,88					-	0,97

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	Penyelenggaraan Pendidikan Informal PAUD dan PNFI	400.000.000	6.261.708.894					391.985.200	6.005.253.500					0,98	0,96					14,65	14,32
15	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar PAUD dan PNFI	2.820.885.000	1.588.617.400					2.718.605.800	1.583.445.800					0,96	1,00					-	-
16	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD dan PNFI	87.695.000	605.142.000					87.680.600	-					1,00	0,00					5,90	1,00
	Program Pembinaan Sekolah Dasar	85.213.512.138	83.102.307.382,68					80.404.213.383,50	80.372.281.873,77					0,94	0,97					-	-
17	Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar	1.036.980.000	742.555.400					968.841.786	567.365.549					0,93	0,76					-	-
18	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	769.270.000	62.828.000					633.448.794	52.474.774					0,82	0,84					-	-
19	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah dasar	383.668.000	238.422.300					364.963.802	236.773.811					0,95	0,99					-	-
20	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Dasar	58.601.539.138	66.810.386.752,68					54.368.454.361,50	64.678.366.708,77					0,93	0,97					-	-
21	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar SD	22.364.107.500	12.789.338.500					22.020.119.980	12.383.786.573					0,98	0,97					-	-
22	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	2.057.947.500	2.458.776.430					2.048.384.660	2.453.514.458					1,00	1,00					-	-
	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	39.638.292.850	33.409.075.393					31.813.669.867	31.256.841.403					0,80	0,94					-	-
23	Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)	195.522.600	-					176.404.856	-					0,90						-	-
24	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	318.990.000	14.982.500					275.444.077	14.510.140					0,86	0,97					-	-
25	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.088.347.000	651.506.400					650.280.400	530.311.919					0,60	0,81					-	-
26	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama	15.736.218.300	16.006.886.193					14.944.221.207	14.911.653.429					0,95	0,93					-	-
27	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar Sekolah Menengah Pertama	17.783.720.950	14.424.944.100					11.397.676.144	13.529.380.492					0,64	0,94					-	-
28	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama	4.515.494.000	2.310.756.200					4.369.643.183	2.270.985.423					0,97	0,98					-	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	10.665.352.000	9.913.877.155					9.886.811.283	9.042.443.525					0,93	0,91					-	-
29	Peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	924.007.500	624.623.960					591.575.168	163.733.389					0,64	0,26					-	-
30	Perencanaan dan Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	8.708.035.250	8.672.002.170					8.660.830.000	8.496.500.000					0,99	0,98					-	-
31	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	1.033.309.250	617.251.025					634.406.115	382.210.136					0,61						-	-
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	338.591.000	-					290.896.965	-					0,86						-	-
32	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	185.591.000	-					155.533.060	-					0,84						-	-
33	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan	153.000.000	-					135.363.905	-					0,88						-	-
	TOTAL(BTL+BL)	565.309.193.771,36	556.101.500.834,81					524.172.881.061,50	499.233.955.050,77					0,93	0,90					-	-

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUH AN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			583.453.816.55 7	427.559.882.52 3	603.899.941.09 8	624.840.708.56 2			564.115.288.648	427.559.882.52 3	603.899.941.09 8	624.840.708.56 2			0,97	1,00	1,00	1,00	0,07	0,11
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			416.298.057.55 0	338.676.749.26 5	434.637.421.34 1	453.744.435.51 0			404.114.975.038	338.676.749.26 5	434.637.421.34 1	453.744.435.51 0			0,97	1,00	1,00	1,00	0,09	0,12
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122.241.068	185.314.500	185.314.500	185.314.500			90.569.500	185.314.500	185.314.500	185.314.500			0,74	1,00	1,00	1,00	0,52	1,05
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.503.250	17.569.000	17.569.000	17.569.000			7.380.000	17.569.000	17.569.000	17.569.000			0,51	1,00	1,00	1,00	0,21	1,38
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			33.640.004	33.925.500	33.925.500	33.925.500			21.035.900	33.925.500	33.925.500	33.925.500			0,63	1,00	1,00	1,00	0,01	0,61
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.186.256	23.370.000	23.370.000	23.370.000			11.397.000	23.370.000	23.370.000	23.370.000			0,54	1,00	1,00	1,00	0,10	1,05
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.911.558	110.450.000	110.450.000	110.450.000			50.756.600	110.450.000	110.450.000	110.450.000			0,96	1,00	1,00	1,00	1,09	1,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			412.674.059.34 4	334.429.508.94 5	430.390.181.02 1	449.497.195.19 0			401.168.344.590	334.429.508.94 5	430.390.181.02 1	449.497.195.19 0			0,97	1,00	1,00	1,00	0,09	0,12
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			412.643.180.786	334.398.630.445	430.359.302.521	449.466.316.690			401.142.719.650	334.398.630.445	430.359.302.521	449.466.316.690			0,97	1,00	1,00	1,00	0,09	0,12
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			30.878.558	30.878.500	30.878.500	30.878.500			25.624.940	30.878.500	30.878.500	30.878.500			0,83	1,00	1,00	1,00	-	0,21
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			555.281.904	537.984.000	537.984.000	537.984.000			396.323.780	537.984.000	537.984.000	537.984.000			0,71	1,00	1,00	1,00	-	0,36
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	37.984.000	37.984.000	37.984.000			-	37.984.000	37.984.000	37.984.000				1,00	1,00	1,00	-	-
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan			555.281.904	500.000.000	500.000.000	500.000.000			396.323.780	500.000.000	500.000.000	500.000.000			0,71	1,00	1,00	1,00	-	0,26
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			458.872.009	779.202.256	779.202.256	779.202.256			393.210.393	779.202.256	779.202.256	779.202.256			0,86	1,00	1,00	1,00	0,70	0,98
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			35.148.658	35.148.658	35.148.658	35.148.658			29.604.565	35.148.658	35.148.658	35.148.658			0,84	1,00	1,00	1,00	-	0,19
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			208.457.776	346.838.648	346.838.648	346.838.648			201.668.000	346.838.648	346.838.648	346.838.648			0,97	1,00	1,00	1,00	0,66	0,72
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			33.025.575	134.154.950	134.154.950	134.154.950			13.694.688	134.154.950	134.154.950	134.154.950			0,41	1,00	1,00	1,00	3,06	8,80
4.4	Fasilitas Kunjungan Tamu			28.295.000	49.670.000	49.670.000	49.670.000			10.275.140	49.670.000	49.670.000	49.670.000			0,36	1,00	1,00	1,00	0,76	3,83
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			153.945.000	213.390.000	213.390.000	213.390.000			137.968.000	213.390.000	213.390.000	213.390.000			0,90	1,00	1,00	1,00	0,39	0,55
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			119.460.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			119.460.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.672.399.969	1.691.075.614	1.691.075.614	1.691.075.614			1.279.907.620	1.691.075.614	1.691.075.614	1.691.075.614			0,77	1,00	1,00	1,00	0,01	0,32
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.225.100	35.433.990	35.433.990	35.433.990			19.396.896	35.433.990	35.433.990	35.433.990			0,84	1,00	1,00	1,00	0,53	0,83
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			373.897.770	373.897.770	373.897.770	373.897.770			244.291.102	373.897.770	373.897.770	373.897.770			0,65	1,00	1,00	1,00	-	0,53
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			321.277.099	327.743.854	327.743.854	327.743.854			305.219.622	327.743.854	327.743.854	327.743.854			0,95	1,00	1,00	1,00	0,02	0,07
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			954.000.000	954.000.000	954.000.000	954.000.000			711.000.000	954.000.000	954.000.000	954.000.000			0,75	1,00	1,00	1,00	-	0,34
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			578.852.200	718.502.200	718.502.200	718.502.200			555.073.715	718.502.200	718.502.200	718.502.200			0,96	1,00	1,00	1,00	0,24	0,29

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel			74.850.000	74.850.000	74.850.000	74.850.000			68.948.225	74.850.000	74.850.000	74.850.000			0,92	1,00	1,00	1,00	-	0,09
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.600.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			-	100.000.000	100.000.000	100.000.000			0,00	1,00	1,00	1,00	-	-
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya			56.000.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000			45.102.290	101.250.000	101.250.000	101.250.000			0,81	1,00	1,00	1,00	0,81	1,24
7.4	Penataan Organisasi			442.402.200	442.402.200	442.402.200	442.402.200			441.023.200	442.402.200	442.402.200	442.402.200			1,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
8	8			116.351.056	215.161.750	215.161.750	215.161.750			112.085.440	215.161.750	215.161.750	215.161.750			0,96	1,00	1,00	1,00	0,85	0,92
8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			116.351.056	215.161.750	215.161.750	215.161.750			112.085.440	215.161.750	215.161.750	215.161.750			0,96	1,00	1,00	1,00	0,85	0,92
B	PPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			158.205.676.202	77.427.913.233	157.531.915.913	158.797.734.738			151.485.609.460	77.427.913.233	157.531.915.913	158.797.734.738			0,96	1,00	1,00	1,00	0,00	0,05
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100.670.177.121	56.517.034.421	91.459.601.543	91.959.601.543			97.261.621.356	56.517.034.421	91.459.601.543	91.959.601.543			0,97	1,00	1,00	1,00	-	-
9.1	Penambahan Ruang Baru			2.214.872.662	960.087.000	5.960.087.000	5.960.087.000			2.198.034.565	960.087.000	5.960.087.000	5.960.087.000			0,99	1,00	1,00	1,00	0,09	0,05
9.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			229.929.393	-	2.000.000.000	2.000.000.000			227.741.903	-	2.000.000.000	2.000.000.000			0,99		1,00	1,00	7,70	7,78
9.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			146.822.838	-	-	-			146.350.000	-	-	-			1,00				1,00	1,00
9.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			17.634.569.975	125.000.000	8.932.696.982	8.932.696.982			17.217.958.229	125.000.000	8.932.696.982	8.932.696.982			0,98	1,00	1,00	1,00	0,49	0,48
9.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			144.557.095	125.000.000	125.000.000	125.000.000			144.150.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,13
9.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.793.451.985	-	-	-			1.650.120.000	-	-	-			0,92				-	-
9.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			88.098.940	420.520.000	420.520.000	420.520.000			86.650.000	420.520.000	420.520.000	420.520.000			0,98	1,00	1,00	1,00	3,77	3,85
9.8	Pengadaan Mebel Sekolah			41.200.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000			39.536.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000			0,96	1,00	1,00	1,00	-	11,14
9.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			632.995.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000			632.555.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	0,11	0,11
9.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik			824.828.465	1.300.000.000	1.300.000.000	1.800.000.000			737.658.978	1.300.000.000	1.300.000.000	1.800.000.000			0,89	1,00	1,00	1,00	1,18	1,44
9.11	penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar			60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	0,67
9.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				100.000.000	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
9.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			88.568.821	1.843.765.614	1.843.765.614	1.843.765.614			82.046.500	1.843.765.614	1.843.765.614	1.843.765.614			0,93	1,00	1,00	1,00	-	21,47
9.14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			76.770.281.947	50.362.661.807	69.497.531.947	69.497.531.947			74.038.820.181	50.362.661.807	69.497.531.947	69.497.531.947			0,96	1,00	1,00	1,00	0,09	0,06
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			32.107.985.600	17.336.138.669	36.275.233.651	36.775.233.651			30.934.180.504	17.336.138.669	36.275.233.651	36.775.233.651			0,96	1,00	1,00	1,00	0,15	0,19
10.01	Penambahan Ruang Kelas Baru			1.959.729.426	415.820.000	5.415.820.000	5.415.820.000			1.946.964.000	415.820.000	5.415.820.000	5.415.820.000			0,99	1,00	1,00	1,00	1,76	1,78
10.02	Pembangunan Fasilitas Parkir				350.000.000	350.000.000	350.000.000				350.000.000	350.000.000	350.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
10.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			10.583.796.856	125.000.000	8.125.000.000	8.125.000.000			10.463.883.600	125.000.000	8.125.000.000	8.125.000.000				1,00	1,00	1,00	0,23	0,22
10.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			574.376.476		2.000.000.000	2.000.000.000			561.574.800		2.000.000.000	2.000.000.000			0,98		1,00	1,00	2,48	2,56

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			646.666.004		2.000.000.000	2.000.000.000			641.966.300		2.000.000.000	2.000.000.000			0,99		1,00	1,00	2,09	2,12
10.06	Pengadaan Mebel Sekolah			175.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000			173.880.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000			0,99	1,00	1,00	1,00	-	0,28
10.07	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			805.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000			805.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	0,72	0,72
10.08	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			133.302.882	649.999.818	649.999.818	1.149.999.818			86.847.450	649.999.818	649.999.818	1.149.999.818			0,65	1,00	1,00	1,00	7,63	12,24
10.09	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.000.000	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
10.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.000.000	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
10.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			1.179.994.854	1.134.294.731	1.134.294.731	1.134.294.731			1.121.264.294	1.134.294.731	1.134.294.731	1.134.294.731			0,95	1,00	1,00	1,00	0,04	0,01
10.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			16.050.119.102	14.111.024.120	16.050.119.102	16.050.119.102			15.132.800.060	14.111.024.120	16.050.119.102	16.050.119.102			0,94	1,00	1,00	1,00	-	0,06
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			18.156.661.667	2.421.081.225	22.099.921.801	22.099.921.801			17.515.878.700	2.421.081.225	22.099.921.801	22.099.921.801			0,96	1,00	1,00	1,00	0,22	0,26
11.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			425.918.600	1.008.918.600	3.008.918.600	3.008.918.600			371.007.000	1.008.918.600	3.008.918.600	3.008.918.600			0,87	1,00	1,00	1,00	6,06	7,11
11.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			282.629.000	262.659.000	262.659.000	262.659.000			280.794.000	262.659.000	262.659.000	262.659.000			0,99	1,00	1,00	1,00	0,07	0,06
11.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD			7.194.892	306.794.892	1.306.794.892	1.306.794.892			-	306.794.892	1.306.794.892	1.306.794.892			0,00	1,00	1,00	1,00	-	-
11.04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			160.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			159.496.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	0,13
11.05	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			602.078.599	220.077.950	220.077.950	220.077.950			588.981.700	220.077.950	220.077.950	220.077.950			0,98	1,00	1,00	1,00	0,63	0,63
11.06	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				50.000.000	50.000.000	50.000.000			-	50.000.000	50.000.000	50.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
11.07	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				250.000.000	250.000.000	250.000.000			-	250.000.000	250.000.000	250.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
11.08	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			-	142.630.783	142.630.783	142.630.783			-	142.630.783	142.630.783	142.630.783				1,00	1,00	1,00	-	-
11.09	Pengelolaan Dana BOP PAUD			16.678.840.576		16.678.840.576	16.678.840.576			16.115.600.000		16.678.840.576	16.678.840.576			0,97		1,00	1,00	-	0,03
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7.270.851.814	1.153.658.918	7.697.158.918	7.962.977.743			5.773.928.900	1.153.658.918	7.697.158.918	7.962.977.743			0,79	1,00	1,00	1,00	0,10	0,38
12.01	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			585.869.632	749.202.325	749.202.325	1.015.021.150			559.275.300	749.202.325	749.202.325	1.015.021.150			0,95	1,00	1,00	1,00	0,73	0,81
12.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000	100.000.000	100.000.000			-	100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
12.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000	50.000.000	50.000.000			-	50.000.000	50.000.000	50.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
12.04	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			141.482.182	404.456.593	404.456.593	404.456.593			138.603.600	404.456.593	404.456.593	404.456.593			0,98	1,00	1,00	1,00	1,86	1,92
12.05	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/informal			6.543.500.000	-	6.543.500.000	6.543.500.000			5.076.050.000	-	6.543.500.000	6.543.500.000			0,78		1,00	1,00	-	0,29
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				200.000.000	205.034.449	310.256.636			-	200.000.000	205.034.449	310.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100.000.000	105.034.449	150.256.636			-	100.000.000	105.034.449	150.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-

No.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUH AN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANG GAR AN	REA LISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100.000.000	105.034.449	150.256.636			-	100.000.000	105.034.449	150.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-
2.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				100.000.000	100.000.000	160.000.000			-	100.000.000	100.000.000	160.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
2.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				100.000.000	100.000.000	160.000.000			-	100.000.000	100.000.000	160.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
D	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			8.950.082.805	10.905.220.025	11.198.259.109	11.646.582.565			8.514.704.150	10.905.220.025	11.198.259.109	11.646.582.565			0,95	1,00	1,00	1,00	0,30	0,37
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			8.950.082.805	10.905.220.025	11.198.259.109	11.646.582.565			8.514.704.150	10.905.220.025	11.198.259.109	11.646.582.565			0,95	1,00	1,00	1,00	0,30	0,37
1.1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			8.032.976.956	9.639.700.000	9.932.739.084	10.381.062.540			8.003.449.650	9.639.700.000	9.932.739.084	10.381.062.540			1,00	1,00	1,00	1,00	0,29	0,30
1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			917.105.849	1.265.520.025	1.265.520.025	1.265.520.025			511.254.500	1.265.520.025	1.265.520.025	1.265.520.025			0,56	1,00	1,00	1,00	0,38	1,48
E	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				200.000.000	187.034.449	195.256.636				200.000.000	187.034.449	195.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	87.034.449	95.256.636				100.000.000	87.034.449	95.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-
1.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	87.034.449	95.256.636				100.000.000	87.034.449	95.256.636				1,00	1,00	1,00	-	-
2.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
2.1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100.000.000				1,00	1,00	1,00	-	-
F	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				150.000.000	140.275.837	146.442.477				150.000.000	140.275.837	146.442.477				1,00	1,00	1,00	-	-
1.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	140.275.837	146.442.477				150.000.000	140.275.837	146.442.477				1,00	1,00	1,00	-	-
1.1	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000	140.275.837	146.442.477				150.000.000	140.275.837	146.442.477				1,00	1,00	1,00	-	-

Keterangan : Mulai tahun 2021 Nomenklatur Program dan Kegiatan berubah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2019 terdiri dari 9 program 33 kegiatan dengan total anggaran sebesar RP. 565.309.193.771,36 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Enam sen*) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar RP. 415.172.531.534,- dan belanja langsung sebesar Rp. 150.136.662.237,36 dengan total realisasi sebesar Rp. 524.172.881.061,50 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Sen*) sebesar 92,72% (dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 338.206.116.434,- dan belanja langsung sebesar Rp. 135.966.769.627,50). Pada tahun 2021 total anggaran sebesar Rp. 583.452.816.557,- terealisasi sebesar Rp. 564.115.288.648,- sebesar 96,7%

Alokasi Anggaran untuk Dinas Pendidikan dari tahun 2019–2021 cenderung stabil dan agak berfluktuasi, Sedangkan tingkat rasio realisasi anggaran dengan pagu anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 0,93, tahun 2020 sebesar 0,90 dan tahun 2021 sebesar 0,97.

Ada yang perlu mendapat perhatian pada tabel diatas bahwa mulai tahun 2021, Program dan Kegiatan berubah menurut Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang tidaklah sendirian, kita juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

*Tabel 2.4.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021 terhadap
Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan*

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan			
1	APK PAUD	93,67		
2	Angka Melek Huruf	94		
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	98,7		
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,11		
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	77,74		
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23		
7	Rata-rata Nilai USBN	71,25		
8	Rata-rata Nilai UN	43,72		
			1. AMH sebesar 92% 2. APM SD/MI sebesar 93 % 3. APK SMP/MTs sebesar 105 % 4. APK SM sebesar 75 %	1. APK PAUD sebesar 78,70 % 2. Nilai rata-ta UN 6,5 3. AMH usia 15 th keatas 95,8% 4. Rata-rata lama sekolah 8,8 th

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Pendidikan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Berdasarkan kebutuhan pengembangan fasilitas berdasarkan fungsi, Kegiatan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sampang, Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan sangat mendukung dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Kebutuhan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Hasil Telaahan terhadap RTRW

No	Pusat Kegiatan	Kecamatan Pendukung PKL / PPK	Kebutuhan Fasilitas	Capaian
1.	PKL Sampang	Perkotaan Sampang sebagai Pusat Pelayanan	Pengembangan vokasi dan penambahan jurusan Poltera	
		PPK Perkotaan Pangarengan	Sekolah Jenjang SMU	
		PPK Perkotaan Camplong	Sekolah Jenjang SMU	
		PPK Perkotaan Jrengik	Sekolah Jenjang SMU	
		PPK Perkotaan Torjun	Sekolah Jenjang SMU	
		PPK Perkotaan Sreseh	Sekolah Jenjang SMU	
2	PPK Kedungdung	Perkotaan Kedungdung Sebagai Pusat Layanan	Pendidikan Formal dan Pesantren	
		PPK Perkotaan Omben	Pendidikan Formal dan Pesantren	
		PPK Perkotaan Robatal	Pendidikan Formal dan Pesantren	
		PPK Perkotaan Karang Penag	Pendidikan Formal dan Pesantren	
		PPK Perkotaan Tambelangan	Pendidikan Formal dan Pesantren	
3.	PPK Ketapang	PPK Perkotaan Ketapang	Sekolah Jenjang SMU dan Pondok Pesantren	
		PPK Banyuates	SMU, SMK	
		PPK Perkotaan Sokobanah	Pendidikan Formal dan Pesantren	

Berdasarkan data diatas rencana tata ruang wilayah telah mengkomudir kepentingan pendidikan meskipun untuk jenjang Dikmen, Dikti maupun Pondok Pesantren bukan kewenangan kita sehingga capaian dari data tersebut diatas belum tersaji akibat dari kewenangan tersebut diatas, sedangkan jenjang PAUD, Dikdas dan PNFI yang merupakan kewenangan kita sudah terpenuhi.

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam

penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2014, Dinas Pendidikan mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
- b. Tujuan 4 : Berkurangnya Kesenjangan

Tabel 2.4.2.

Analisis Capaian Indikator TPB untuk Tujuan Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Satuan	Capaian Indikator TPB						GAP
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	%	97,88	98,65	97,31	97,4	96,65%	94,41	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	%	77,21	81,72	67,42	74,76	83,55%	81,76%	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat								

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Satuan	Capaian Indikator TPB						GAP
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%		110,99 %	115,39%	112,11%	109,32	105,08%	103,78%	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%		98,42 %	103,81%	102,18%	102,11%	102,22%	103,31%	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun		3,65	3,79	4,12	4,35	4,55	4,85	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%		85,23	84,26	83,05	85,43	87,76%	88,11%	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%		87,01 %	89,76%	91,73%	92,44%	92,75%	92,8%	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Satuan	Capaian Indikator TPB						GAP
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Meningkat								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		79,11	86,67	91,44	82,81	84,19	92,48	

Berdasarkan telaahan terhadap hal tersebut diatas ada beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yaitu:

No	Tantangan	Peluang
1	Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Sampang masih tinggi sehingga menurunkan tingkat prioritas untuk memperoleh pendidikan	Kebijakan pemerintah pusat tentang pemberian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah mulai tahun 2005;
2	Masih adanya penduduk 15 tahun keatas yang buta aksara, yang penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan kendalanya juga masih cukup besar yaitu permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat	Adanya aturan tentang Anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20 % sehingga anggaran pendidikan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan anggaran pemerintah
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD masih rendah sehingga memerlukan percepatan untuk mencapai kondisi yang ideal, sehingga membutuhkan sumber daya yang besar utamanya pendanaan	Rencana kebijakan pemerintah tentang program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD
4	Masih rendahnya tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Sampang, utamanya sektor pendidikan	Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (Inpres No. 5 tahun 2006) sehingga anggaran cukup tersedia
5	Masih banyaknya penduduk Kabupaten Sampang 15 tahun keatas yang tidak tamat SD	Kebijakan daerah tentang Gerakan Wajib Belajar Paket A melalui Peraturan Bupati

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Aksesibilitas Pendidikan, dimana masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Kabupaten Sampang khususnya Indeks Pendidikan;
2. Masih rendahnya Kualitas Pendidikan yang ditandai dengan rendahnya Nilai rata-rata USBN untuk SD dan nilai rata-rata UNBK SMP yang masih dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional meskipun saat ini UN sudah tidak dilaksanakan lagi namun penggantinya Asesment Nasional dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi walaupun hasilnya belum didapatkan. Selain itu faktor kualitas dan kuantitas guru juga masih sangat rendah serta sarana dan prasarana belum terpenuhi secara memadai.

Berdasarkan data- data pada bab sebelumnya penyebab dari 2 permasalahan yang sifatnya makro tersebut diatas karena permasalahan antara lain:

1) 15,96% Penduduk Kabupaten Sampang Usia 15 Tahun Keatas Tidak Tamat SD/MI

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sampang masih mencapai 12,38 tahun, masih jauh jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 13,36 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah masih mencapai 4,86 tahun sangat jauh dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 7,88 tahun.

Rendahnya HLS dan RLS ini disebabkan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan masih kurang terutama dimasa yang lalu, sehingga menyebabkan masih banyaknya penduduk Kabupaten Sampang yang berusia diatas 15 tahun yang tidak tamat SD/MI yaitu sebesar 15,96%.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu indikator yang menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusi (IPM) bidang Pendidikan atau Indeks Pendidikan.

2) Belum Tuntasnya Buta Aksara

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2021 dari BPS sebesar 70,66% dari jumlah penduduk 882.242 orang yaitu sebanyak 622.863 orang, yang bisa membaca dan menulis sebanyak 503.086 (80,77%) orang, jadi yang menyandang buta aksara sebanyak 119.777 orang (19.23%). Dari data tersebut angka melek huruf Kabupaten Sampang menurut BPS sebesar 80,77%.

Sementara itu, garapan buta aksara untuk kelompok usia 15-44 Tahun sudah tuntas pada Tahun sebelumnya. Artinya, untuk kelompok umur tersebut sudah tidak ada lagi penduduk buta aksara

Untuk kelompok penduduk usia 45 keatas, yang belum digarap melalui program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar. Diperlukan berbagai upaya untuk menuntaskan garapan dikelompok usia ini, mengingat sebagian dari mereka adalah kelompok lanjut usia yang sudah enggan untuk mengikuti Keaksaraan Fungsional

3) Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN)

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 61,63 masih dibawah capaian rata-rata Provinsi sebesar 65,37. Sedangkan rata-rata Nilai Ujian Nasional jenjang SMP/MTs sebesar 40,67 jauh dibawah capain rata-rata Provinsi dengan nilai sebesar 52,96. Pada tahun 2019 dan 2020 UN dan USBN tidak dilaksanakan, Tapi pada tahun 2021 dilaksanakan Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) untuk pemetaan mutu pendidikan tetapi sampai saat ini hasilnya belum dikeluarkan dari Kemendikbud Dikti. Untuk ukuran nilai memakai hasil Ujian Sekolah sehingga nilainya menjadi kelihatan baik.

Rendahnya nilai USBN dan UN tersebut disebabkan karena adanya regulai baru yang dibuat Kemendikbud seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) basi siswa SMP/MTs dan soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Disamping itu kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta kurangnya jumlah guru PNS dan kapasitas guru ikut mempengaruhi hasil tersebut.

Nilai USBN dan UN sebagai indikator mutu utamanya lulusan sehingga mempengaruhi proses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

4) Kapasitas dan Kinerja Guru

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mensyaratkan guru dari TK hingga SMA/SMK harus memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Meskipun di Kabupaten Sampang masih ada yang kurang memenuhi namun tidak terlalu banyak.

Berdasarkan kualifikasi tidak terlalu bermasalah namun dari segi Kapasitas masih rendah dengan indikator Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Uji Kompetensi terakhir nilai UKG sebesar 56,50 masih dibawah capaian rata-rata provinsi sebesar 61,89 sehingga diperlukan program pengembangan kapasitas.

Kondisi ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas para guru-guru agar memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan tugasnya.

5) Angka Putus Sekolah

Pada Tahun 2021 lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang sebanyak 1.074 SD/MI dan 506 SMP/MTs, dengan jumlah siswa sebanyak 113.542 siswa SD/MI dan 49.571 siswa SMP/MTs.

Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2021

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Sekolah	1.074	506	
2	Siswa	113.542	49.571	
3	Lulusan	17.604	15.046	
4	Guru	9.004	5.521	
5	Mengulang	1.629	313	
6	Putus Sekolah	276	361	

Berdasarkan data diatas terdapat siswa putus sekolah yaitu sebanyak 276 siswa SD/MI bila dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada angka putus sekolah sebesar 0,25% jauh lebih tinggi dari dari target 0,11%. Untuk jenjang SMP/MTs terdapat 361 siswa bila dibandingkan dengan jumlah siswa SMP/MTs angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,74 % jauh diatas target sebesar 0,23 %.

Kondisi ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Angka putus sekolah yang cukup tinggi ini terutama jenjang SMP/MTs hal ini disebabkan pernikahan dini,

bekerja membantu orang tua, dan masalah sosial dan budaya lainnya serta Pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini.

6) Kekurangan Guru

Kecukupan guru merupakan, salah satu dukungan utama terhadap proses pembelajaran yang efektif. Disatu sisi, rasio guru terhadap rombel yang rendah dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran sehingga tidak efektif. Sementara disisi lain rasio guru terhadap rombel yang tinggi menyebabkan adanya guru kelas yang mempunyai jam mengajar di bawah standar. Berikut diuraikan gambaran mengenai rasio guru terhadap rombongan belajar pada masing-masing jenjang pendidikan.

Gambaran kasar dengan membandingkan jumlah guru PNS dan kebutuhan guru menunjukkan bahwa jumlah guru kelas SD negeri pada Tahun 2021 tidak mencukupi. Jumlah guru SD yang berstatus sebagai ASN sebanyak 2.557 orang, sedangkan kebutuhan guru berdasarkan rombel yang ada sebanyak 4.582 orang. Secara keseluruhan terdapat kekurangan guru PNS/PPPK sebesar 2.014 guru.

KEBUTUHAN GURU SD PER DESEMBER 2018

NO	JENIS JABATAN	KEBUTUHAN GURU	JUMLAH GURU PNS	KEKURANGAN GURU	KET
1	2		3		4
2	Guru kelas	3.552	2.076	1.476	
3	Guru Agama	515	275	240	
4	Guru Penjaskes	515	216	299	
	JUMLAH	4.582	2.557	2.014	

Rasio guru mata pelajaran terhadap rombel pada jenjang SMP/MTs untuk masing-masing pelajaran berbeda-beda, tergantung dari jumlah jam semester (js) dari mata pelajaran. Mata pelajaran dengan jumlah jam 2, rasio ideal antara guru dengan rombel adalah 1:12, artinya 1 orang guru memerlukan jam mengajar di 12 rombel. Sedangkan mata pelajaran dengan jumlah jam 4, rasio idealnya adalah 1:6, artinya 1 orang guru memerlukan jam mengajar di 6 rombel. Apabila rasio itu terpenuhi, maka guru mata pelajaran yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut adalah gambaran jumlah guru

ideal yang diperlukan untuk masing-masing matapelajaran dan identifikasi kecukupan guru untuk masing-masing mata pelajaran di SMP Negeri Kabupaten Sampang.

Jumlah kebutuhan guru SMP Negeri Kabupaten Sampang pada Tahun 2021 adalah 827 orang sedangkan jumlah guru ASN yang ada sebanyak 591 orang, untuk semua mata pelajaran terdapat kekurangan guru SMP negeri, dengan jumlah sebesar 236 guru untuk berbagai mata pelajaran. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang kelebihan guru seperti data berikut:

KEBUTUHAN GURU SMP TAHUN 2021					
NO	JENIS JABATAN	KEBUTUHAN GURU	GURU PNS YANG ADA	KEKURANGAN GURU	KET
1	Pendidikan Agama	56	40	16	
2	PKn	57	61	-4	
3	Bahasa Indonesia	85	65	20	
4	Bahasa Inggris	68	75	-7	
5	Matematika	72	76	-4	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	80	85	-5	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	73	80	-7	
8	Seni Budaya	60	23	37	
9	Penjaskes	56	32	23	
10	Prakarya/Ketrampilan	41	12	39	
11	Bahasa Madura	43	0	43	
12	Bimbingan Konseling	69	30	39	
13	TIK	67	12	55	
JUMLAH		827	591	236	

7). Terbatasnya sarana dan prasarana

Mutu input pendidikan digambarkan melalui kecukupan ruang kelas; kelayakan ruang kelas dan kecukupan jumlah guru untuk keseluruhan lembaga SD/MI. Dari sisi kecukupan jumlah ruang kelas, rasio ruang kelas SD/MI terhadap rombongan belajar secara umum sudah cukup memadai. Namun apabila dihitung secara keseluruhan Rombongan Belajar yang ada sebanyak 6,366 rombongan, sedangkan Ruang kelas yang ada sebanyak 6.445 RK. Sehingga tidak ada kekurangan Ruang Kelas. Berdasarkan kelayakan ruang kelas, secara keseluruhan baru terdapat 62,88 % ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan, selebihnya ruang kelas yang ada dalam kondisi rusak berat (23,99%), dan rusak total (0,88%).

Kondisi di atas menggambarkan bahwa banyak ruang kelas di SD/MI dalam kondisi tidak layak, bahkan 24,87 % dalam kondisi dapat membahayakan keselamatan murid dan guru. Kurang optimalnya manajemen aset di Dinas Pendidikan dan terbatasnya dana pemeliharaan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kerusakan ruang kelas.

Terkait dengan sumber belajar, perpustakaan semestinya memegang peran penting, tetapi jumlah SD/MI yang memiliki perpustakaan masih sangat terbatas. bahwa ketersediaan Perpustakaan di SD/MI pada tahun 2021 baru mencapai 87,89%, tersebar di 1.074 SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian SD/MI (12,11%) belum memiliki perpustakaan.

Data Prasarana Tahun 2021

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Sekolah	1.074	506	
2	Rombongan Belajar	6.366	1.892	
3	Ruang Kelas	6.445	2.048	
4	Perpustakaan	944	286	
5	Ruang UKS	611	205	
6	Tempat Olahraga	354	9	
7	Laboratorium	6	164	

Pada Tahun 2021, jumlah siswa SMP/MTs mencapai sebesar 48.641 siswa tersebar di 506 lembaga, dengan rombongan berjumlah 1.892, maka rasio jumlah siswa terhadap rombongan SMP/MTs sebesar 1/25,71, sedangkan ruang kelas yang ada sebanyak 2.048 RK secara keseluruhan tidak kekurangan ruang kelas.

Kekurangan dan kelebihan Prasarana Tahun 2021

No.	Variabel	SD	SMP	Ket
1	Ruang Kelas	(79)	(156)	
2	Perpustakaan	130	220	
3	Ruang UKS	463	301	
4	Tempat Olahraga	720	497	
5	Laboratorium	1.068	342	

Dari kelayakan ruang kelas, sebagian besar (63,47%) ruang kelas dalam kondisi baik. Selebihnya, dalam kondisi rusak berat sebanyak 388 (18,95%), dan rusak total 10 (0,49%).

Jika mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sarana dan prasarana dengan pagu siswa per rombongan belajar sebesar 28 maka layanan ini melebihi ukuran standar nasional.

Ruang Kelas menurut Kondisi Tahun 2021

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	3.197	1.004	
2	Rusak Ringan	855	296	
3	Rusak Sedang	790	350	
4	Rusak Berat	1.546	388	
5	Rusak Total	57	10	
	Jumlah	6.445	2.048	
1	% Baik	49,61	49,02	
2	% Rusak Ringan	13,27	14,45	
3	% Rusak Sedang	12,26	17,09	
3	% Rusak Berat	23,99	18,95	
5	% Rusak Total	0,88	0,49	

Sarana perpustakaan baru dimiliki oleh 56,52% SMP/MTs, tersebar di 286 SMP/MTs. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian SMP/MTs (43,48%) belum mempunyai perpustakaan yang dapat menjadi salah satu sumber belajar siswa. Sedangkan ketersediaan Ruang UKS baru dimiliki oleh 205 SMP/MTs (40,51%), sehingga sekitar 59,49% SMP/MTs belum memiliki UKS. Sarana Laboratorium baru dimiliki oleh 164 SMP/MTs (32,41%), sehingga ada sekitar 67,59% SMP/MTs belum memiliki Laboratorium.

Perpustakaan menurut Kondisi Tahun 2021

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	671	228	
2	Rusak	273	58	
	Jumlah	944	286	
1	% Baik	71,08	79,72	
2	% Rusak	28,92	20,28	

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi Tahun 2021

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	185	172	
2	Rusak	426	33	
	Jumlah	611	205	
1	% Baik	30,25	83,90	
2	% Rusak	69,75	16,10	

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang dapat memberikan dampak yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun identifikasi permasalahan dalam bidang Pendidikan berdasarkan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalah an Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANG AN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Kab. Sampang Tidak Tamat SD/MI	15,96 %	BPS	Pendidikan Non Formal	Lembaga PKBM dikelola masyarakat	Banyak penduduk tidak tamad SD/MI
Belum Tuntasnya Buta Aksara	19,23 %	Angka Buta Huruf	Keterbatasan dana dan SDM	Hambatan social dan ekonomi	Masih tingginya angka buta huruf
Nilai USBN dan UN	61,37, 40,67	USBN/UN	Ketidak siapan Guru dan siswa	Adanya regulasi baru	Rendahnya Nilai USBN dan UN
Kapasitas dan Kinerja Guru	56,50 %	UKG	Terbatasnya dana peningkatan kapasitas	Peningkatan kapaitas mandiri rendah	Rendahnya kapasitas dan kinerja guru
Angka Putus Sekolah	SD 0,25 SMP 0,74	APS	Sosial Ekonomi Masyarakat	Pandemi Covid-19	Tingginya Angka Putus sekolah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalah an Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANG AN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kekurangan Guru	Guru SMP 236, Guru SD 2.014	Kebutuh an guru	Kekurangan Guru PNS	Pengangkata n Guru PNS dari Pusat	Terbatasnya guru PNS
Terbatasnya sarana dan prasarana	SD 1.901, SMP 101	Kekuran gan R. Kelas SD/MI, SMP/M Ts	Kurangnya dana pemeliharaa n	Anggaran yang terbatas	Masih ada R. Kelas yang Rusak berat dan kekurangan R. Kelas

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain- lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencapaian SDGs	Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.	Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.	
2		Sosial, Budaya dan Lingkungan Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global; (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara; (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal; (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki	Sosial, Budaya dan Lingkungan Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas empat Kabupaten di Wilayah Madura dan bahkan Propinsi Jawa Timur; (2) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal; (4) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan; (5)	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008); (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan; (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga; (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy).	perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan; (6) masih rendahnya kualitas SDM Kabupaten Sampang untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy).	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024 yaitu **“Sampang Hebat Bermartabat”**. Sektor pendidikan berkait pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka dapat diuraikan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang besar meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga menyulitkan tata kelola dan peningkatan kinerja ditambah lagi beragam kapasitas yang dimiliki aparatur dan

kekurangan aparatur yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

2. Besarnya sasaran pembangunan pendidikan sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencapai kondisi yang diharapkan;
3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, infra struktur dan keamanan sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan secara keseluruhan,

2. Faktor – faktor Pendorong Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang, faktor – faktor untuk mendukung keberhasilan sebagai berikut

1. Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas masalah yang akan diselesaikan. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sampang akan sangat tergantung pada upaya terintegrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang cenderung kompleks.
2. Pendidikan masih merupakan prioritas dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping bidang-bidang yang lain.
3. Alokasi pendanaan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang memungkinkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan, meskipun memang kebutuhannya jauh melebihi hal tersebut.
4. Dukungan dana dari Pemerintah Pusat baik berupa BOS maupun dalam bentuk lainnya serta dari APBD Provinsi, asumsinya peserta didik dari keluarga miskin tidak lagi memiliki hambatan biaya dalam melanjutkan pendidikannya.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>Sampang Hebat Bermartabat</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			

	Program			
1.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1. Pendidikan Anak usia Dini	Belum maksimalnya APK PAUD	Sebagai besar PAUD swasta	Ada insentif pengelolaan PAUD
	2. Pendidikan Sekolah Dasar	Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
		Masih tingginya Angka Putus sekolah	Pandemi dan Kondisi sosial ekonomi	Sosialisasi dan pendampngan
	3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belum maksimalnya APM SMP/MTs	Sasaran yang besar	Kebijakan Pendidikan dan PPDB
		Masih tingginya Angka Putus sekolah	Pandemi dan Kondisi sosial ekonomi	Sosialisasi dan pendampngan
	4. Pendidikan Non Formal/ Informal	Masih adanya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
		Banyaknya penduduk yang tidak tamat SD/MI	Social masyarakat	Adanya kepedulian pemerintah
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	5. Penetapan Kurikulum Mulok	Kurang maksimalnya mulok bhs. madura	Kekurangan tenaga pendidik mulok	Pendidikan dan pelatihan
3.	PROGRAM PENDIDIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	6. Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kuantitas dan kapasitas	Terbatasnya anggaran	Skala prioritas
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
	7. Perizinan Pendidikan	Rasio sekolah dengan jumlah penduduk	Rekomendasi izin perlu dikendalikan	Skala prioritas
5	PROGRAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
	8. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	Kurang maksimalnya pengembangan bahasa dan sastra daerah	Membutuhkan sumber daya yang besar	Pendidikan dan pelatihan secara betahap

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Belum maksimalnya APK PAUD	Sebagai besar PAUD swasta	Ada insentif pengelolaan PAUD
		Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
		Masih tingginya Angka Putus sekolah	Pandemi dan Kondisi sosial ekonomi	Sosialisasi dan pendampingan
		Belum maksimalnya APM SMP/MTs	Sasaran yang besar	Kebijakan Pendidikan dan PPDB
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Masih tingginya Angka Putus sekolah	Pandemi dan Kondisi sosial ekonomi	Sosialisasi dan pendampingan
		Masih rendahnya kualitas pendidikan	Terbatasnya sarpras dan kekurangan Guru PNS	Adanya kebijakan insentif GTT
3	Menguatnya karakter peserta didik	Masih tingginya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
		Masih rendahnya nilai UN dan USBN	Mebutuhkan sumber daya yang besar	Pendidikan dan pelatihan secara betahap

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan layanan pendidikan untuk penduduk usia 25 Tahun	Masih tingginya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
		Belum maksimalnya APM SMP/MTs	Sasaran yang besar	Kebijakan Pendidikan dan PPDB
		Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
		Masih tingginya Angka Putus sekolah	Pandemi dan Kondisi sosial ekonomi	Sosialisasi dan pendampngan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD di tinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitas Pendidikan di seluruh kecamatan	Persebaran Fasilitas pendidikan kurang merata	Jenjang PAUD sebagian besar swasta	Ada insentif bagi pengelola dan tutor PAUD
			Jenjang Dikmen belum wajib belajar sehingga kurang support dari pemerintah pusat	Adanya program pendidikan menengah universal

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisa profil layanan pendidikan yang terdiri dari analisis internal, analisis eksternal dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan pendidikan Kabupaten Sampang. Analisis internal merupakan profil pendidikan yang menggambarkan kondisi

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang. Sementara analisis eksternal meliputi analisis perkembangan penduduk usia sekolah, indeks kemiskinan penduduk, kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkait dengan pendidikan. Masukan dari stakeholder diperoleh melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan stakeholders dari unsur Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, LSM, media massa, organisasi masyarakat, pengelola pondok pesantren dan madrasah diniyah.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal tersebut, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Banyak penduduk Kabupaten Sampang yang tidak tamat SD/MI yaitu sebesar 15,96%.
- 2) Belum tuntasnya Buta Aksara, yaitu sebesar 19,23%.
- 3) Rendahnya nilai rata-rata USBN dan UN, yaitu USBN sebesar 61,63 dan UNBK sebesar 41,27.
- 4) Masih rendahnya kapasitas dan kinerja guru, yang ditandai dengan nilai UKG sebesar 56,50.
- 5) Masing tingginya Angka Putus Sekolah, Jenjang SD/MI sebesar, 0,25 % dan Jenjang SMP/MTs sebesar 0,74 %
- 6) Masih kurangnya Guru yang berstatus ASN pada jenjang SD dan Guru Bidang Studi tertentu di tingkat SMP.
- 7) Terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal, khususnya sarana ruang kelas, perpustakaan, laboratorium di semua jenjang beserta buku dan peralatannya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024 yaitu **“Sampang Hebat Bermartabat”**. Sektor pendidikan berkaitan pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas pendidikan Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut.

4.1. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Visi - Misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang merupakan penjabaran makna dari misi, sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Misi dan tujuan di atas, harus dapat mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga akan memiliki daya ubah yang signifikan. Dari isu strategis yang dirumuskan berdasarkan analisa profil pendidikan, maka sasaran dari tujuan setiap misi pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024, yang diuraikan menurut jenjang pendidikan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KINERJA RPJMD										
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
Tujuan: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Indeks Pendidikan	N	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,59	0,62

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH										
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,76	12,08	12,37	12,66			
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	4,35	4,55	4,85	4,92			
Sasaran: Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	1. APK PAUD	%	85,43	87,76	88,11	98,7			
	2	Angka Melek Huruf	%	92,75	92,75	92,75	0,11			
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	96,65	94,41	77,74			
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,12	0,23	0,23			
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	74,76	83,55	81,76	93,87			
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,02	0,57	92,75			
	7	Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	65,15	68,45	71,25			
	8	Rata-rata Nilai UN	N	40,67	41,7	42,68	43,72			
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH										
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		1 Harapan Lama Sekolah (HLS)						13,06	13,46	13,76
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)						5,02	5,29	5,39
Sasaran: Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%					99,1	99,6	100
	2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%					0,10	0,09	0,08
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%					78,85	79,55	80,5
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%					0,22	0,21	0,20
	5	APK PAUD	%					95,9	98,1	101
	6	Angka Melek Huruf	%					92,75	92,75	92,75
	7	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	N					1,62	1,72	1,82
	8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional						1,57	1,67	1,77

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
		9 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional						1,59	1,69	1,79
		10 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N					1,68	1,78	1,88

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran strategis harus dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan yang baik sehingga akan memiliki daya ubah yang signifikan. Dari isu strategis yang dirumuskan berdasarkan analisa profil pendidikan, maka Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Sampang Hebat Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Harapan Lama sekolah 2. Peningkatan rata-rata lama sekolah 	<p>1. Peningkatan Harapan lama sekolah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E absensi di masing - masing sekolah dan e-report untuk Pengawas Sekolah 2. Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 3. Memenuhi & memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Memberikan Insentif Honor GTT dari APBD Kabupaten 5. Mengusulkan kekurangan guru ASN ke Bupati 6. Program Ayo bermain di PAUD <p>2. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Penduduk yg tdk tamat Pendidikan Dasar 2. Memberi Insentif kepada Penduduk yg mau masuk program paket A dan Paket B 3. Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun 4. Memberi Beasiswa kpd Anak Lulusan SMP/MTs Sederajat yang melanjutkan SMA/MA/SMK/MAK. 5. Membentuk gerakan Tuntas Paket A dan Paket B bagi masyarakat Sampang yang tidak berijazah SD dan SMP dengan berdasarkan data Terpadu Kabupaten.

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi layanan pendidikan yang ada saat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Disamping itu, mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Sampang, Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Kemendikbud, mengingat bahwa sebagian dari rencana strategis kabupaten akan bersinergi dalam implementasinya.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat digunakan strategi sebagai berikut.

- 1) Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sebesar 11,76 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,76 tahun atau setara dengan SMA
- 2) Peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak, RLS Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sebesar 4,35 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Sampang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 4,35 tahun atau hampir menamatkan kelas V.

Kebijakan yang dibangun dalam Renstra PD mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang terkait strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama sekolah secara garis besar terbagi pada dua hal tersebut.

Kebijakan–kebijakan untuk Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E absensi di masing-masing sekolah dan e-report untuk Pengawas Sekolah;
- 2) Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang merupakan Inovasi;
- 3) Memenuhi dan memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 4) Menberikan Insentif Honor GTT dari APBD Kabupaten;
- 5) Mengusulkan kekurangan guru ASN ke Bupati;

6) Program Ayo Bermain di PAUD yang merupakan Inovasi.

Kebijakan-kebijakan untuk Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata Penduduk yang tidak tamat Pendidikan Dasar;
- 2) Memberi Insentif kepada Penduduk yang mau masuk program paket A dan Paket B;
- 3) Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun;
- 4) Memberi Beasiswa kepada Anak Lulusan SMP/MTs sederajat yg berprestasi untuk meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA/MAK;
- 5) Membentuk gerakan Tuntas Paket A dan Paket B bagi masyarakat Sampang yang tidak berijazah SD dan SMP dengan berdasarkan data Terpadu Kabupaten yang merupakan Inovasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan program dan kegiatan Renstra sesuai dengan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran. Program dalam renstra Dinas Pendidikan dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Jika rumusan program mengakomodasi struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan yang mengedepankan fungsi, maka perlu dimunculkan sub program yang merupakan isu strategis prioritas dan merupakan integrasi antar bidang.

Kegiatan sebagai penjabaran program dirumuskan secara terintegrasi berdasarkan akar masalah dari prioritas issue strategis. Dengan demikian, kegiatan yang teridentifikasi dari upaya penyelesaian isu strategis prioritas dikelompokkan sesuai dengan jenjang pendidikan. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencakup:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan Informal
2. Program Pendidikan Sekolah Dasar
3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Rincian anggaran berdasarkan sumber dana dari program tersebut diatas diuraikan secara rinci sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

DINAS PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PAGU INDIKATIF	139.750.528.700	144.811.038.700	149.306.505.693	163.005.724.108	166.449.580.335	177.328.783.210
Rincian:						
DAK	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000
BOS	69.304.200.000	72.769.410.000	76.407.880.50	80.228.274.525	84.239.688.251	88.451.672.664

DINAS PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			0			
DBHCHT	0	0	0	0	0	0
JASMAS DPRD	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000
PIK	2.421.700.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000
JKN/BLUD	0	0	0	0	0	0
PAJAK ROKOK	0	0	0	0	0	0
DAU	34.279.859.700	34.279.859.700	35.136.856.193	45.015.680.583	44.448.123.084	51.115.341.546

Sedangkan kegiatan–kegiatan sebagai dari program tersebut diatas diuraikan secara rinci sebagaimana tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikator Dinas pendidikan Kabupaten Sampang

UJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA																					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	(1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,76	12,08		12,37												
				(2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	4,36	4,55		4,85												
	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan		Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	96,65		94,41												
				2. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,12		0,23												
				3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	%	74,76	83,55		81,76												
				4. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,02		0,57												
				5. APK PAUD	%	85,43	87,76		88,11												
				6. Angka Melek Huruf	%	92,75	92,75		92,75												
				7. Rata-rata Nilai USBN	N																
				8. Rata-rata Nilai UN	N																
		A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI DAN TUNJANGAN)																		
		1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	Gaji dan Tunjangan	bulan	14	14	388.206.111,434	14	367.805.572.392,00											
		B.	BELANJA LANGSUNG																		
			Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan	%	100	100	2.203.559.239	100	1.988.353.115											

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				administrasi perkantoran																	
		1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	7028	3500	1.472.800.189	3500	1.733.206.377											
				Rekening listrik, telepon dan air yang terbayar	bulan	12	12		12												
				Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas operasional kendaraan selama 1 tahun	unit	310	380		290												
				Jasa kebersihan kantor yang terlaksana	bulan	12	12		12												
				Tenaga teknis dan tenaga keamanan yang terlaksana	bulan		12		12												
		2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan ATK selama setahun	bulan	16 lbg	12	503.482.050	12	194.850.350											
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	16 lbg	12		12												
				jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan	16 lbg	12		12												
				kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	bulan	16 lbg	12		12												
				Jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang tersedia	bulan	64 lbg	12		12												
				jumlah makan dan minum selama setahun	bulan	12	12		12												
		3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	OK	12	1100	227.277.000	12	60.296.388											
				Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	OK	12	1211		12												
			Program	Persentase	%	100	100	1.029.658.07	100%	433.708.9											

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			%	0	28													
		4	Pembangunan/Rehab /Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	lembaga	16	15	482.324.975	3	169.389.000												
				Jumlah perlengkapan kantor terpelihara dengan baik	lembaga	16	15															
		5	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	pemeliharaan Kendaraan dinas yang terlaksana	unit	5	5	100.577.220	3	114.787.782,00												
		6	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap	lembaga	15	15	446.755.875	15	149.532.146												
				Jumlah Komputer, laptop dan printer	unit		21		15													
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	0	-		0												
		7	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/ Seminar	pengiriman pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana	0		0	-	0	0												
			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publiik	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%		100 %	173.286.145	100%	246.183.257												
		8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	buku		10	101.954.680	1	66.773.258												
				Jumlah Dokumen laporan keuangan semester	buku		30		0													
				Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	buku		30		30													
				Jumlah Dokumen daftar gaji	bulan		12		12													
		9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Jumlah dokumen RKA-DPA SKPD	dokumen		2	29.284.445	2	26.780.225												

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
			Penganggaran	Jumlah dokumen Renja SKPD	dokumen		1		1													
				Jumlah dokumen Renstra SKPD	dokumen		1															
		10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Program/kegiatan unggulan yang ditampilkan	kegiatan		2	42.047.020	0	152.629.774												
				- Jumlah pelaksanaan Rakor/Evaluasi bidang Pendidikan	kegiatan				12													
				- Jumlah kegiatan penyusunan Data Pokok Pendidikan	kegiatan				3													
			Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia dini	orang		34,53	10.164.674.675	17,44	8.088.570.557												
				Persentase Peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf	%		92,75%		80,75%													
				Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian	%		90,85%		100,00%													
		11	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;	Jumlah PAUD yang Mandapatkan Bantuan BOP	lembaga		89	230.143.625	700	192.997.731,00												
				Jumlah peserta Pelatihan Kurikulum K 13 bagi pendidik PAUD	orang		150															
		12	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Pelatihan kompetensi bagi pendidik PAUD	orang		200	119.139.450	70	88.078.796,00												
				Jumlah Ijin Operasional Baru dan Ijin Perpanjangan PAUD	lembaga		0															
		13	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket	32 lembaga		32	6.617.120.000	30	218.794.730												

UJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				A, B dan C																	
				Lomba Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional/ Nasional	kegiatan		2		0												
				Kelompok yang melaksanakan pendidikan keaksaraan	pokjar		256		0												
				Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	kegiatan		1		1												
		14	Penyelenggaraan Pendidikan Informal PAUD dan PNFI	Jumlah peserta pendidikan kursus dan kelembagaan dan Pendidikan Keluarga	orang		1400	391.985.200	0	6.005.253.500											
				Jumlah peserta Bimtek Bagi Tutor dan Penyelenggara PAUD	orang		96		0												
				Jumlah Izin Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	lembaga		10		0												
				Jumlah PAUD /PNFI yang terakreditasi	lembaga		80		0												
				HR Guru Ngaji	orang				6000												
		15	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar PAUD dan PNFI	Jumlah gedung sekolah bertambah	unit		8	2.718.605.800	1	1.583.445.800,00											
				Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	rk		6		2												
				Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	paket		4		1												
				Jumlah bangunan sekolah yang direhab	unit		2														
				Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	unit		3														

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
		16	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD dan PNFI	Jumlah meubeler bertambah	lembaga		6	87.680.600	0	0												
			Program Pembinaan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	%		105,08%	80.404.213.384	103,78%	80.372.281.873,77												
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	orang		101,22		17													
				Sekolah SD kondisi bangunan baik	%		77,92%		98,52%													
				Angka kelulusan (AL) SD/MI	%		99,66%		98,40%													
				Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%		89,76%		94,44%													
				Persentase SD berakreditasi minimal B	%		72,67		72,77													
		17		Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah peserta Pelatihan Guru Kelas Kurikulum 2013	guru		184	968.841.786	616	567.365.549											
			Jumlah peserta Pelatihan CTL/Literasi		guru		46		0													
			Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Muatan Lokal /Pramuka		guru		46		0													
			Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran		guru		46		0													
			Jumlah peserta Pelatihan Inovasi Pembelajaran		guru		180		0													
			Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran bagi Guru Al-Qur'an		guru		36															
			Jumlah guru Pembelajaran Al-		guru		97		98													

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Qur'an yang mendapatkan insentif																	
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi KBM	lembaga		56														
		18	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	Jumlah peserta USBN	siswa		12114	633.448.794		180		52.474.774,00									
				Jumlah Peserta Try Out	siswa		12114														
				- Jumlah Kisi-kisi Ujian sekolah (US) SD 2 Mapel	guru																
		19	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah dasar	Jumlah Siswa SD berprestasi yang terjamin di Tingkat Provinsi	siswa		168	364.963.802													
				Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lembaga		685														
				Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	orang		200														
				Persentase SD yang Ber UKS	%		80														
				Persentase Pemenang Lomba OSN, FLS2N dan O2SN di tingkat Provinsi	%		20														
		20	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Dasar	Jumlah Dana BOS yang di berikan untuk SD dan Madin	sekolah		617	54.368.454.361,50													
				Jumlah Monev yang dilakukan ke sekolah Penerima BOS	lembaga		120														
		21	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar SD	Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	rk		30	22.020.119.980													
				Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	paket		4														
				Jumlah bangunan toilet bertambah	ruang		8														
				Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	unit		2														

UJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah ruang kelas yang direhab	rk		199		60												
				Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	ruang		2		15												
				Jumlah toilet sekolah yang direhab	unit		28		58												
				- Jumlah bangunan perpustakaan bertambah	unit				3												
				- Jumlah ruang UKS bertambah	ruang				1												
		22	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Jumlah meubelair ruang kelas sekolah	paket		7	2.048.384.660	11	2.453.514.458											
				Jumlah buku koleksi perpustakaan	paket		39		39												
			Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B	%		102,22%	31.813.669.867	100,31%	31.256.841.403											
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	orang		102,61		28												
				Sekolah SMP kondisi bangunan baik	%		90,23%		72,61%												
				Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%		99,65%		96,18%												
				Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	%		81,74%		85,04%												
				Persentase SMP berakreditasi minimal B	%		34,77%		38,87%												
		23	Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah peserta pelatihan dan pengembangan kurikulum SMP	guru		300	176.404.856	0	0											
				Jumlah peserta Pembinaan MGMP	0		0		0												
				Jumlah peserta	0		0		0												

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Pelatihan pengembangan contextual teaching and learning (CTL)																	
				Jumlah peserta pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis TIK	guru		50														
				Jumlah kegiatan monev	lembaga		100		0												
		24	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	Jumlah peserta UAN	siswa		7000	275.444.077	0	14.510.140											
				Jumlah Monev yang dilaksanakan	lembaga		100		0												
		25	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP berprestasi yang terjaring di Tingkat Provinsi	orang		9	650.280.400	0	530.311.919											
				Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lembaga		250		267												
				Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	lembaga		200		0												
				Persentase SMP yang Ber UKS	%		100%		76,78%												
				Persentase Pemenang Lomba OSN,FLS2N, Gala Siswa dan O2SN SMP di tingkat Provinsi	%		35%		0												
				Jumlah Peserta yang ikut P4GN	peserta		200		267												
				Jumlah peserta yang ikut Pekan Seni Pelajar	lembaga		200		0												
				Jumlah peserta yang ikut Gala Siswa	peserta		185		0												
		26	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Operasional sekolah	lembaga		267	14.944.221.207	267	14.911.653.429,00											
				Jumlah sekolah yang mendapatkan Program PIP	lembaga		267		267												

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		27	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang kelas baru bertambah	rk		9	11.397.676.144	6	13.529.380.492											
				Jumlah Ruang Lab. IPA bertambah	ruang		2		3												
				Jumlah perpustakaan sekolah bertambah	unit		2		3												
				Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	rk		56		40												
				Jumlah bangunan taman, lapangan upacara dan parkir bertambah	paket		7		2												
				Jumlah ruang guru yang direhab	paket		2		0												
				Jumlah jamban guru/siswa bertambah	unit		17		8												
				Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	paket		2														
				- Jumlah bangunan multimedia bertambah	paket				1												
				- Jumlah bangunan lab computer bertambah	ruang				3												
				- Jumlah Lab yang direhab	ruang				4												
				- Jumlah rehab perpustakaan bertambah	ruang				4												
		28	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah meubeler RKB bertambah	paket		7	4.369.643.183		2.270.985.423											
				Jumlah peralatan LAB Komputer bertambah	paket		14		7												
				Jumlah alat praktek dan peraga siswa	paket		1														
				- Jumlah meubeler perpustakaan bertambah	paket				1												
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid SD/MI	orang		12	9.886.811.283	12	9.042.443.525											
				Rasio guru terhadap murid	orang		12		11												

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				SMP/MTs																	
				Prosentase guru yang memenuhi standar kualifikasi	%		77,85		92												
		29	Peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	Jumlah calon Kepala sekolah yang memenuhi Standar	orang		70	591.575.168	163.733.389												
				Jumlah Calon Pengawas yang memenuhi standar	orang		60		57												
				Jumlah Guru, Pengawas, Pamong Belajar dan penilik yang memenuhi angka kredit	orang		900		26												
									900												
		30	Perencanaan dan Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Literasi	guru		40	8.660.830.000	8.496.500.000												
				Terbayarnya HR GTT	GTT		2000		0												
				Jumlah Guru yang bersertifikasi	guru		145		0												
		31	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang Berprestasi	orang		42	634.406.115	382.210.136,00												
				Monev kinerja Guru, Pengawas sekolah	orang		600		0												
									300												
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase informasi/data base pendidikan yang terupdate	%		97,20%	290.896.965													
		32	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Data Pokok Pendidikan yang tersusun	%		100%	155.533.060													
				Evaluasi kinerja bidang pendidikan	%		100%														
				Jumlah Rapat koordinasi Pendidikan yang dilaksanakan	kegiatan		1														
		33	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan	Peringatan hari besar pendidikan	kegiatan		3	135.363.905													

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)					135.675.872.662,50													
			TOTAL(BTL+BL)					523.881.984.096,50													
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN																					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	(1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun						12,66		13,06		13,46		13,76				
				(2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun						4,92		5,02		5,29		5,39				
	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan		Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%						98,7		99,1		99,6		100				
				2. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%						0,11		0,10		0,09		0,08				
				3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	%						77,74		78,85		79,55		80,5				
				4. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%						0,23		0,22		0,21		0,20				
				5. APK PAUD	%						93,87		95,9		98,1		101				
				6. Angka Melek Huruf	%						92,75		92,75		92,75		92,75				
				7. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	N						71,25		1,62		1,72		1,82				
				8. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	N						43,72		1,57		1,67		1,77				
				9. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N								1,59		1,69		1,79				
				10. Rata-rata	N								1,68		1,78		1,88				

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									575.486.866.557		427.559.882.523		603.899.941.098		624.840.708.562			
		01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi							100	416.298.057.550	100	338.676.749.265	100	434.637.421.341	100	453.744.435.510			
		1.0 1.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan perencanaan dan penganggaran penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	122.241.068	100	185.314.500	100	185.314.500	100	185.314.500			
		1.0 1.0 1.2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja	keg						1	14.503.250		17.569.000		17.569.000		17.569.000			
		1.0 1.0 1.2. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA-SKPD	keg						1	33.640.004		33.925.500	1	33.925.500	1	33.925.500			
		1.0 1.0 1.2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja Instansi Pemerintah	keg						1	21.186.256		23.370.000	2	23.370.000	2	23.370.000			
		1.0 1.0 1.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Data Pokok Pendidikan	keg						1	52.911.558		110.450.000	1	110.450.000	1	110.450.000			
		1.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase urusan keuangan penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	412.674.059.344		334.429.508.945		430.390.181.021		449.497.195.190			
		1.0 1.0 1.2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	bln						14	412.643.180.786	14	334.398.630.445	14	430.359.302.521	14	449.466.316.690			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		1.0 1.0 1.2 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	kg						1	30.878.558	1	30.878.500	1	30.878.500	1	30.878.500			
		1.0 1.0 1.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	555.281.904		537.984.000		537.984.000		537.984.000			
		1.0 1.0 1.2 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	org						3	-	3	37.984.000	3	37.984.000	3	37.984.000			
		1.0 1.0 1.2 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		kg						1	555.281.904	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
		1.0 1.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase urusan umum penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	458.872.009		779.202.256		779.202.256		779.202.256			
		1.0 1.0 1.2 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	jumlah kebutuhan komponen listrik dan bendera/spanduk /umbul-umbul kantor	bln						12	35.148.658	12	35.148.658	12	35.148.658	12	35.148.658			
		1.0 1.0 1.2 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml Komputer/lapto yang terbeli	bh						20	208.457.776	20	346.838.648	20	346.838.648	20	346.838.648			
				Jumlah AC yang terbeli	bh						6		10		10		10				
		1.0 1.0 1.2 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml barang cetakan dan penggandaan	bln						12	33.025.575	12	134.154.950	12	134.154.950	12	134.154.950			
		1.0 1.0 1.2 06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jml makanan dan minuman dalam setahun	bln						12	28.295.000	12	49.670.000	12	49.670.000	12	49.670.000			
		1.0 1.0 1.2 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan rakor/evaluasi bidang pendidikan	kg						1	153.945.000	1	213.390.000	1	213.390.000	1	213.390.000			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				jumlah rakor dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	ok						360		360		360		360				
		1.0 1.0 1.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase urusan barang milik daerah urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%						100	120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000			
		1.0 1.0 1.2. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas	unit						1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000			
		1.0 1.0 1.2. 08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase urusan jasa penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	1.672.399.969	100	1.691.075.614	100	1.691.075.614	100	1.691.075.614			
		1.0 1.0 1.2. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	surat						3.500	23.225.100	3.500	35.433.990	3.500	35.433.990	3.500	35.433.990			
		1.0 1.0 1.2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Kawat/Faksimile/ Internet yang terbayarkan selama 1 Tahun	bln						12	373.897.770	12	373.897.770	12	373.897.770	12	373.897.770			
		1.0 1.0 1.2. 08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa kebersihan kantor yang terlaksana selama 1 Tahun	bln						12	321.277.099	12	327.743.854	12	327.743.854	12	327.743.854			
				Jumlah kebutuhan ATK selama setahun	bln						12		12		12		12				
		1.0 1.0 1.2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga teknis dan tenaga keamanan selama 1 Tahun	bln						12	954.000.000	12	954.000.000	12	954.000.000	12	954.000.000			
		1.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase urusan pemeliharaan barang penunjang pemerintahan daerah yang	%						1	578.852.200	100	718.502.200	100	718.502.200	100	718.502.200			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				difasilitasi																	
		1.0 1.0 1.2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	unit						3	74.850.000	3	74.850.000	3	74.850.000	3	74.850.000			
				Pemeliharaan perizinan kendaraan dinas selama 1 Tahun	unit						144		144		144		144				
		1.0 1.0 1.2. 09. 05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan meubeler kantor	unit						1	5.600.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000			
		1.0 1.0 1.2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin	unit						15	56.000.000	15	101.250.000	15	101.250.000	15	101.250.000			
		1.0 1.0 1.2. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah kantor yang di rehab	unit						2	442.402.200	1	442.402.200	1	442.402.200	1	442.402.200			
				Jumlah pemb. pagar	unit						1		1		1		1				
				Jumlah gedung yang dipelihara	unit						15		15		15		15				
		1.0 1.0 1.2. 13	Penataan Organisasi	Persentase urusan penataan organisasi penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	116.351.056	100	215.161.750	100	215.161.750	100	215.161.750			
		1.0 1.0 1.2. 13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kegiatan Hardiknas	keg						3	116.351.056	3	215.161.750	3	215.161.750	3	215.161.750			
				terbayarnya hibah dewan pendidikan	keg						1		1		1		1				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
		01. 01. 02.	PPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi	%						100	150.238.726.202	100	77.427.913.233	100	157.531.915.913	100	158.797.734.738			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				dalam pendidikan dasar *)																	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan *)	%						100		100		100		100				
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD *)	%						100		100		100		100				
		1.0 1.0 2.2. 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	%						107,50	93.382.427.121	107,00%	56.517.034.421	106,5	91.459.601.543	106	91.959.601.543			
				Rasio Siswa SD/MI per Rombel (1:36)	orang						16,50		17		17,50		18				
				Persentase Bangunan SD kondisi bangunan baik	%						83,50		83,50%		87,50		90,50				
				Angka kelulusan (AL) SD/MI	%						99,56		99,56%		99,58		99,59				
				Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%						97		96,78%		96,82		96,84				
				Persentase SD Berakreditasi Minimal B	%						67,25		67,25%		67,55		67,80				
		1.0 1.0 2.2. 01. 02	Penambahan Ruang Baru	jml penambahan ruang kelas baru	rk						4	2.214.872.662	29	960.087.000	29	5.960.087.000	29	5.960.087.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jml pembangunan Perpustakaan sekolah	ruang						1	229.929.393	8	-	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jml Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang						8	146.822.838	36	-	36	-	36	-			
		1.0 1.0 2.2. 01.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	rk						234	17.634.569.975	280	125.000.000	280	8.932.696.982	280	8.932.696.982			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		08																			
		1.0 1.0 2.2. 01. 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah rehab ruang guru	unit						1	144.557.095	8	125.000.000	8	125.000.000	8	125.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehab Perpustakaan	unit						10	1.793.451.985	16	-	16	-	16	-			
		1.0 1.0 2.2. 01. 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jml Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit						1	88.098.940	40	420.520.000	40	420.520.000	40	420.520.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jml pengadaan mebel sekolah	unit						15	41.200.000	24	480.000.000	24	480.000.000	24	480.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jml Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit						10	632.995.000	14	700.000.000	14	700.000.000	14	700.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta Pelatihan Penguatan/Peningkatan Mutu Pembelajaran	guru						500	824.828.465	500	1.300.000.000	500	1.300.000.000	500	1.800.000.000			
				Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	guru						100		100		100		100				
				Jumlah Sekolah Pilot Project Peningkatan Prestasi Sekolah	sklh						7		7		7		7				
				Jumlah Sekolah Inspirasi	sklh						28		28		28		28				
				Jumlah Sekolah Inklusi	sklh						2		2		2		2				
				Jumlah AKM/UBKD-PISA	sklh						618		618		618		618				
				Jumlah monev KBM	sklh						112		112		112		112				
		1.0 1.0 2.2. 01. 26	penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	OB						45	45.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		1.0 1.0 2.2. 01. 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	penetapan angka kredit	keg								1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 01. 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jml Siswa SD berprestasi terjaring di Tk Provinsi	siswa					170	88.568.821	170	1.843.765.614	170	1.843.765.614	170	1.843.765.614				
				Jml Siswa yg masuk PPDB online/offline	lembaga				690		690	690	690		690						
				jml siswa yg mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas	orang				200		200	200	200		200						
				Persentase SD yang ber UKS	%				1		100	100	100		100						
				Persentase pemenang lomba OSN, FLS2N dan O2SN di tingkat Provinsi	%				0		25	25	25		25						
		1.0 1.0 2.2. 01. 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga penerima BOS	lembaga				69.497.531.947	618	50.362.661.807	618	69.497.531.947	618	69.497.531.947	618	69.497.531.947				
				Jumlah lembaga penerima BOSDA/MADIN	%				1		100	100	100		100						
		1.0 1.0 2.2. 02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%					102,24	31.687.985.600	102,26	17.336.138.669	102,28 %	36.275.233.651	102,30	36.775.233.651				
				Rasio Siswa SMP/MTs per Rombel (1:32)					27,60		27,80	28,00	28,20								
				Persentase bangunan SMP kondisi bangunan baik					88,72		89,22	89,72 %	90,22								
				Angka kelulusan (AL) SMP/MTs					97,66		97,70	97,73 %	97,75								
				Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK					77,96		77,99	78,02 %	78,05								
				Persentase SMP Berakreditasi					26,59		26,84	27,09	27,34								

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Minimal B											%						
		1.0 1.0 2.2. 02. 02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	jml penambahan RKB	rk						9	1.539.729.426	20	415.820.000	20	5.415.820.000	20	5.415.820.000			
			Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah taman,lap upacara, dan fasilitas parkir yang terbangun	unit								2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jml Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	rk						56	10.583.796.856	25	125.000.000	25	8.125.000.000	25	8.125.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	jml Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ruang						3	574.376.476	3		3	2.000.000.000	3	2.000.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jml Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	unit						3	646.666.004	10		10	2.000.000.000	10	2.000.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jml Pengadaan Mebel Sekolah	paket						8	175.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jml Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit						3	805.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah AKM/UBKD-PISA	sklh						280	133.302.882	280	649.999.818	280	649.999.818	280	1.149.999.818			
				Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	guru						100										
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi KBM	sklh						112		112		112		112				
				Jumlah peserta Pelatihan Penguatan/Peningkatan Mutu Pembelajaran	guru						500										

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah Sekolah Inklusi	sklh						2										
				Jumlah Sekolah Inspirasi	sklh						28										
				Jumlah sekolah pilot project peningkatan mutu	sklh						7										
		1.0 1.0 2.2. 02. 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	pembinaan pegawai	keg								1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	penetapan angka kredit	keg								1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
		1.0 1.0 2.2. 02. 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hibah Beasiswa	%						1	1.179.994.854	100	1.134.294.731	100	1.134.294.731	100	1.134.294.731			
				Jumlah peserta yang ikut Gala Siswa	lembaga						250		250		250		250				
				Jumlah Peserta yang ikut P4GN	lembaga						200		200		200		200				
				Jumlah peserta yang ikut Pekan Seni Pelajar	lembaga						200		200		200		200				
				Jumlah Siswa SMP berprestasi yang terjaring di Tingkat Provinsi	orang						9		9		9		9				
				Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lembaga						250		250		250		250				
				Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	lembaga						200		200		200		200				
				Persentase Pemenang Lomba OSN,FLS2N, Gala Siswa dan OZSN SMP di tingkat Provinsi	%						0		0		0		0				
				Persentase SMP yang Ber UKS	%						1		1		1		1				

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		1.0 1.0 2.2 02. 42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jml lembaga penerima BOS	sklh						53	16.050.119.102	53	14.111.024.120	53	16.050.119.102	53	16.050.119.102			
		1.0 1.0 2.2 03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Siswa PAUD per Rombel (1:15)	orang						15,80	17.897.461.667	15,6	2.421.081.225	15,40	22.099.921.801	15,20	22.099.921.801			
				Persentase PAUD terakreditasi	%						9,27		12,09		14,92		17,74				
		1.0 1.0 2.2 03. 01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/R. Guru PAUD	unit						2	308.918.600									
		1.0 1.0 2.2 03. 02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	jumlah bangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah bertambah	unit						2	282.629.000									
		1.0 1.0 2.2 03. 03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung /R. Kelas/R. Guru PAUD	unit						3	7.194.892									
		1.0 1.0 2.2 03. 12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	alat praktek dan peraga siswa bertambah	unit						9	160.000.000									
		1.0 1.0 2.2 03. 13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta pelatihan K13 bagi pendidik PAUD	guru						150	459.878.599									
		1.0 1.0 2.2 03. 15.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	pembinaan GTK	keg								1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
		1.0 1.0 2.2 03. 16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	penetapan angka kredit	keg								1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000			
		1.0 1.0 2.2 03. 17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan kompetensi bagi pendidik PAUD	orang						200	-									
													200	142.630.783	200	142.630.783	200	142.630.783			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah Ijin Operasional Baru dan Ijin Perpanjangan PAUD	lembaga						100		100		100		100				
		1.0 1.0 2.2 03. 19	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mandapatkan Bantuan BOP	lembaga						700	16.678.840.576				16.678.840.576		16.678.840.576			
		1.0 1.0 2.2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian	%						82,25	7.270.851.814	82,25%	1.153.658.918	83	7.697.158.918	85	7.962.977.743			
				Persentase lembaga PKBM terakreditasi	%						28		37,5		47		56				
		1.0 1.0 2.2 04. 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	lembaga						32	585.869.632	32	749.202.325	32	749.202.325	32	1.015.021.150			
				Lomba Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional/ Nasional	keg						2		2		2		2				
				Jumlah Monev dan pelaporan	keg						1		1		1		1				
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	pembinaan pegawai	1 keg								1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	penetapan angka kredit	1 keg								1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
		1.0 1.0 2.2 04. 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dan Pendidikan Keluarga	orang						100	141.482.182	200	404.456.593	200	404.456.593	200	404.456.593			
				Jumlah peserta Bimtek Bagi Tutor dan Penyelenggara PAUD	orang						96		100		100		100				

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah Izin Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	lembaga						10		10		10		10				
				Jumlah PAUD /PNFI yang terakreditasi	lembaga						180		180		180		180				
		1.0 1.0 2.2. 04. 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/informal	Jumlah Lembaga mendapatkan BOP	lembaga						32	6.543.500.000	32	-	32	6.543.500.000	32	6.543.500.000			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Dikdas	%								100	200.000.000	100	205.034.449	100	310.256.636			
				Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD/PNFI	%								100		100		100				
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kurikulum Mulok SD dan SMP	kurklm								2	100.000.000	2	105.034.449	2	150.256.636			
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah penetapan kurikulum mulok	bh								2	100.000.000	2	105.034.449	2	150.256.636			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kurikulum Mulok PAUD dan PNFI	kurklm								2	100.000.000	2	100.000.000	2	160.000.000			
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	jumlah penet	bh								2	100.000.000	2	100.000.000	2	160.000.000			
		01. 01. 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid SD/MI (1:15)	orang						13,70	8.950.082.805	14,00	10.905.220.025	14,20	11.198.259.109	15,00	11.646.582.565			
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (1:20)	orang						13,90		15,00		17,00		20,00				
		1.0 4.2. 01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	persentase guru memenuhi standar kualifikasi	%						92	8.950.082.805	92	10.905.220.025	100	11.198.259.109	100	11.646.582.565			

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
			Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
		1.0 1.0 4.2 01. 01	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang Berprestasi	orang						42 org	8.032.976.956	42	9.639.700.000	42	9.932.739.084	42	10.381.062.540				
				Terbayarnya HR GTT	gtt						2.000		2.000			2.000						
		1.0 1.0 4.2 01. 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah calon Kepala sekolah yang memenuhi Standar	orang					70	917.105.849	70	1.265.520.025	70	1.265.520.025	70	1.265.520.025					
				Jumlah Calon Pengawas yang memenuhi standar	orang					60		60		60		60						
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Rekomendasi Perizinan lembaga Pendidikan Dasar	%								0,25	200.000.000	0,25	187.034.449	0,25	195.256.636				
				Persentase Pengendalian Rekomendasi Perizinan lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal	%								8,00		8,00		8,00					
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase rekom izin dari usulan	%								80	100.000.000	80	87.034.449	75	95.256.636				
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan	lembaga								10	100.000.000	10	87.034.449	10	95.256.636				
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase rekom izin dari usulan	%								80	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000				

UJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan	lembaga								15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000				
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan bahasa dan sastra daerah	%								100	150.000.000	100	140.275.837	100	146.442.477				
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra	%								100	150.000.000	100	140.275.837	100	146.442.477				
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	workshop bahasa dan sastra	keg								2	150.000.000	2	140.275.837	2	146.442.477				

6.2. Indikator Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Disdik selama periode tahun 2019-2024 diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator dan target kinerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2019–2024 sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 6.1 tingkat keberhasilannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Rincian tentang indikator dan target kegiatan disajikan pada Matriks Kegiatan Renstra Disdik Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 tersebut diatas.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Untuk mewujudkan Visi - Misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang merupakan penjabaran makna dari misi, sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas dengan melaksanakan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selama periode tahun 2019 – 2024 diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat (sebelum)								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,76	12,08	12,37	12,66				
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4,35	4,55	4,85	4,92				
	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan								
1	APK PAUD	85,43	87,76	88,11	98,7				
2	Angka Melek Huruf	92,75	92,75	92,75	0,11				
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,4	96,65	94,41	77,74				
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,12	0,23	0,23				
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	74,76	83,55	81,76	93,87				

No.	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,26	0,02	0,57	92,75				
7	Rata-rata Nilai USBN	61,63	65,15	68,45	71,25				
8	Rata-rata Nilai UN	40,67	41,7	42,68	43,72				
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat (Sesudah)								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)					13,06	13,46	13,76	13,76
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					5,02	5,29	5,39	5,39
	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A					99,1	99,6	100	100
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI					0,10	0,09	0,08	0,08
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B					78,85	79,55	80,5	80,5
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs					0,22	0,21	0,20	0,20
5	APK PAUD					95,9	98,1	101	101
6	Angka Melek Huruf					92,75	92,75	92,75	92,75
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional					1,62	1,72	1,82	1,82
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional					1,57	1,67	1,77	1,77
9	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					1,59	1,69	1,79	1,79
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					1,68	1,78	1,88	1,88

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan adalah indikator kinerja dampak (*impact*), sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*).

Tabel 7.1
Keterhubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN		SASARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN		Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						KONDISI AKHIR RENSTRA (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan					N	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,59
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)			Tahun	11,76	12,11	12,46	12,84	13,23	13,63	14,02	14,02
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Tahun	4,35	4,58	4,82	5,07	5,33	5,6	5,88	5,88
				Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	APK PAUD	%	85,43	87,5	90,58	93,67	95,9	98,1	101	101
					Angka Melek Huruf	%	92,75	93	93,5	94	94,5	95	95,5	95,5
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	97,9	98,3	98,7	99,1	99,6	100	100
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	74,76	75,76	76,78	77,74	78,65	79,55	80,5	80,5
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,2
					Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	65,15	68,45	71,25				
					Rata-rata Nilai UN	N	40,67	41,7	42,68	43,72				
					ANBK SD	N					73,75	74,15	75	75
					ANBK SMP	N					44,68	45,7	46,72	46,72

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	REALISASI		TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
	<i>Pendidikan :</i>									
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	4,36	4,55	4,85	5,07	5,33	5,60	5,88	5,88
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	11,76	12,08	12,37	12,84	13,23	13,63	14,02	14,02
	APK PAUD	%	85,44	87,76	88,11	93,67	95,90	98,10	101,00	101,00
	APK SD	%	109,32	108,5	108	107,50	107,00	106,50	106,00	106,00
	APK SMP	%	102,11	102,2	102,22	102,24	102,26	102,28	102,30	102,30
	APM SD	%	97,4	97,9	94,41	98,70	99,10	99,60	100	100
	APM SMP	%	74,76	75,76	81,76	77,74	78,65	79,55	80,50	80,50
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan									
	Indeks Pendidikan	(indeks)	0,470	0,485	0,505	0,520	0,530	0,550	0,560	0,560
	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum*	%	-	-	-	46,85	47,24	47,50	47,75	47,75

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	REALISASI		TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum*	%	-	-	-	25,15	25,56	25,75	25,95	25,95
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini*	%	90	88	88,11	90,25	90,5	90,75	91	91
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar*	%	95,9	104	96,79	97,00	97,25	97,50	97,75	97,75
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan*	%	42,63	10	10,08	10,25	10,35	1,45	10,55	10,55

BAB VIII **P E N U T U P**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Penerapan semua ketentuan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, maupun aset dan anggaran yang sangat besar memiliki kompleksitas paling tinggi diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Disamping itu tuntutan masyarakat yang besar akan keberhasilan pendidikan menjadikan beban yang makin berat.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024

Semoga dokumen Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019 – 2024 Perubahan ini dapat menjadi panduan dan arahan bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Sampang kedepannya.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAJDI



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)

A

AMK	=	Angka Mengulang Kelas
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
APTS	=	Angka Putus Sekolah

B

BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAPPEDA	=	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAWASDA	=	Badan Pengawas Daerah
BKM	=	Bantuan Khusus Murid
BOP	=	Biaya Operasional Penyelenggaraan
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	=	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOMM	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	=	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPKP	=	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPNFI	=	Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan

C

CSR	=	Corporate Social Responsibility
CTL	=	Contextual Teaching and Learning (Pembelajaran Kontekstual)

D

DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Dekonsentrasi	=	Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
Depdiknas	=	Departemen Pendidikan Nasional
DPISS	=	District Planning Information Support Sistem
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disparitas	=	Perbedaan konsep dan standar
Distance Learning	=	Pembelajaran jarak jauh

E

EDI	=	Education Development Index
EFA	=	Education for All

F

FGD = Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

G

Gender = Kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang deletakkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya

H

HAN = Hari Anak Nasional

HDI = Human Development Index

I

IKK = Indikator Kinerja Kunci

Inpres = Instruksi Presiden

IPA = Ilmu Pengetahuan Alam

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPS = Ilmu Pengetahuan Sosial

IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ISO = International Standard Operations

J

Jardiknas = Jejaring Pendidikan Nasional

K

KB = Kelompok Bermain

KBK = Kurikulum Berbasis Kopetensi

KF = Keaksaraan Fungsional

KKN = Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KKG = Kelompok Kerja Guru

KKKS = Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah

KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal

KKPS = Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L

LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Learning Resources Center = Pusat Sumber Belajar

LI = Laporan Individu Sekolah

Life Skills = Kecakapan hidup

Life Long Education = Pendidikan sepanjang hayat

Litbang = Penelitian dan Pengembangan

Literasi = Melek Aksara

LKP = Lembaga Kursus dan Pendidikan

LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

LPTK	=	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSK	=	Lembaga Sertifikasi Kompetensi
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
M		
MA	=	Madrasah Aliyah
MAK	=	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBS	=	Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	=	Millennium Development Goals
Mendiknas	=	Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	=	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	=	Madrasah Ibtidaiyah
Misi	=	Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
MKKS	=	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	=	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Musrenbang	=	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
N		
N/A	=	Not Available
P		
PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Formal	=	TK/TKLB dan pendidikannya disebut Guru
PAUD Nonformal	=	Play Group, Posyandu, Tempat Penitipan Anak, Home Schooling, dan pendidikannya disebut Tutor
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PEK	=	Pengembangan Ekonomi Kreatif
Permendiknas	=	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PKBM	=	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	=	Pendidikan Kecakapan Hidup
PNFI	=	Pendidikan Nonformal dan Informal
PP	=	Peraturan Pemerintah
PSB	=	Penerimaan Siswa Baru
PTK-PNF	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal
PUG	=	Pengarusutamaan Gender
Prodi	=	Prigram Studi
PTK PAUD	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak Usia Dini
R		
RA	=	Raudatul Athafal
Reaching The Unreached	=	Perserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal
Renstra	=	Rencana Strategi
Renja	=	Rencana Kerja
RKB	=	Ruang Kelas Baru

RKPD	=	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKAS/M	=	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah
RKS/M	=	Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
RKTS/M	=	Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	=	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

S

Satker	=	Satuan Kerja
SBI	=	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	=	Sekolah Dasar
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	=	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	=	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SOP	=	Standar Operasi dan Pendidikan
SSSE	=	Supported School Self Evaluation
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SST	=	Sistem Skoring Terpadu untuk penerimaan siswa baru
Stakeholders	=	Orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan, keterlibatan atau investasi dalam suatu organisasi
Strategi	=	Rencana yang menguraikan pola keputusan yang diambil tentang bagaimana organisasi akan mewujudkan misi dan mencapai visinya dengan sumber daya yang tersedia serta menghadapi persaingan dan tantangan
SUKMA	=	Surat Keterangan Melek Aksara

T

Tata Nilai	=	Pandangan hidup adan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	=	Taman Baca Masyarakat
Tendik	=	Tenaga Pendidik
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	=	Taman Kanak kanak

U

UASBN	=	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKM	=	Uji Kendali Mutu
UKS	=	Usaha Kesehatan Sekolah
UN	=	Ujian Nasional
UNPK	=	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
UNESCO	=	United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
USB	=	Unit Sekolah Baru
UU	=	Undang Undang
UUD 1945	=	Undang Undang Dasar 1945

V

Vokasi	=	Keahlian Terapan
--------	---	------------------

W

Wajar	=	Wajib Belajar
WB	=	Warga Belajar
WCU	=	World Class University
WDP	=	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	=	Wajar Tanpa Pengecualian
WTO	=	World Trade Organization